



**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JALALLUDIN MUHAMMAD AKBAR
DI INDIA TAHUN 1556-1605 M**

SKRIPSI

Oleh :

Sari Agustina

NIM 130210302010

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JALALLUDIN MUHAMMAD AKBAR
DI INDIA TAHUN 1556-1605 M**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1
(S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar
Sarjana Pendidikan

Oleh :

Sari Agustina

NIM 130210302010

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1) Ayah Satimin dan Ibu Katiyah Terkasih, terima kasih telah memberikan kasih sayang, semangat serta do'a dalam meraih gelar sarjana dan mimpi-mimpi yang belum tercapai;
- 2) guru-guruku di TK Kusuma Mulia 3, SDN Jagalan V, SMPN 7 Kediri, MAN 2 Kediri, dan dosen-dosen perguruan tinggi yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
- 3) Almamater Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Apabila dikatakan kepadamu, "berilah kelapangan didalam majelis-majelis," maka lapangkanlah niscaya Allah akan memeberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.

(Al-Mujadalah ayat 11)*)

Tidak ada hasil yang menghianati sebuah usaha**)

*) Hidatattulloh. A & Sail. I. S. 2011. Al-Qur'an Transliterasi Per-kata Dan Terjemahan Per-kata. Bekasi: Cipta Bangun Negara

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Sari Agustina

NIM : 130210302010

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar di India Tahun 1556-1605 M” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Desember 2017

Yang menyatakan,

Sari Agustina

NIM 130210302010

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JALALLUDIN MUHAMMAD AKBAR
DI INDIA TAHUN 1556-1605 M**

Oleh
Sari Agustina
NIM 130210302010

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sumarjono, M. Si.
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sumarno, M. Pd.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar Di India Tahun 1556-1605 M” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : 29 September 2017

tempat : Ruang Sidang Pendidikan Sejarah

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sumarjono, M, Si.
NIP 195808231987021001

Drs. Sumarno, M. Pd.
NIP 195221041984031002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Marjono, M. Hum.
NIP 196004221988021001

Drs. Kayan Swastika, M, Si.
NIP 196702102002121002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D.
NIP 196808021993031004

RINGKASAN

Kebijakan Pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar di India Tahun 1556 – 1605 M; Sari Agustina, 130210302010; 2017: xiii + 78 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Kedatangan bangsa Mughal di India membawa perubahan sistem pemerintahan yang berjalan di India dengan adanya akulturasi dari budaya Hindu dan Islam, pengaruh kepemimpinannya terlihat ditahun 1556-1605 M. Tahun 1556-1605 M merupakan masa keemasan Mughal dibawah Jalalludin Muhammad Akbar. Kebijakan pemerintahan Mughal di India dibawah Akbar dapat dikatakan berhasil baik dari segi politik, sosial-ekonomi, agama dan seni. Mughal merupakan kerajaan bercorak agama Islam, hal ini merupakan suatu prestasi yang besar dimana negara Islam Mughal dapat berdiri dan menjadi penguasa terbesar di negara berdominasi agama Hindu dan menyatukan antara dua budaya kedalam satu wadah pemerintahan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah latar belakang dari kebijakan kepemimpinan Jalalludin Muhammad Akbar, kebijakan yang dijalankan di India dan dampak dari kebijakan pemerintahan Akbar pada tahun 1556-1605 M. Tujuan dari penelitian ini mengkaji secara mendalam pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar yang dilihat dari kebijakan yang dijalankan dari berbagai bidang yaitu bidang politik, sosial, ekonomi, agama, seni-budaya serta dampak kebijakan yang dijalankan di India. Manfaat penelitian ini digunakan sebagai referensi bacaan guna menambah wawasan kesejarahan tentang kebijakan pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M dan bagi peneliti memberi pengalaman serta mengasah kemampuan dalam menulis karya Ilmiah.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yang terdapat empat langkah yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik serta teori struktural fungsional dalam mengkaji penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan proses dari usaha Jalalludin Muhammad Akbar menerapkan kebijakan selama memerintah di India tahun 1556-1605 M yang dapat dilihat dari berbagai bidang antara lain bidang politik, ekonomi, agama, seni dan budaya. Kebijakan pemerintahan Akbar menuai keberhasilan yang cemerlang di bidang politik dengan penerapan basis pemerintahan militeristik dengan sistem politik *Sulh-e-kul*, sistem ekonomi pemerintahan Akbar diperoleh dari sistem dagang, pertanian, dan pajak daerah. Agama yang dianut raja adalah Islam, banyaknya keanekaragaman budaya dan agama yang dianut masyarakat India, Akbar mentoleransi semua agama yang berkembang di India dengan diterapkannya UU *Din Illahi* guna menyeimbangkan kehidupan antar agama yang damai dan tidak terjadi konflik. Budaya Mughal muncul dari proses akulturasi budaya India dan Mughal (Persia), Mughal merupakan sebuah bangsa yang tidak berbudaya dan mengadopsi budaya dari daerah kekuasaannya untuk dijadikan budaya dari bangsa Mughal.

Simpulan dari penelitian ini (1) latar belakang kebijakan yang dijalankan Akbar diberbagai bidang yaitu politik, sosial-ekonomi, agama dan seni ; (2) strategi kebijakan pemerintahan Sultan Akbar di bidang politik, sosial-ekonomi, agama dan seni yang menuai keberhasilan yang luar biasa dalam menyeimbangkan dan mempertahankan kekuasaan di India; (3) dampak kebijakan pemerintahan Akbar di India rata-rata memberikan dampak positif bagi perkembangan negara India. Akbar berhasil menstabilkan sistem ekonomi Mughal dengan menerapkan politik *Sulh-e-kul*, menjadikan perdamaian dalam setiap umat beragama dan menghasilkan berbagai kesenian sebagai identitas dari bagi bangsa Mughal.

Saran yang diberikan penulis adalah: (1) bagi mahasiswa, hendaknya melanjutkan atau mengembangkan penelitian sejenis tentang kebijakan Akbar; (2) bagi peneliti, hendaknya sebagai media melatih untuk berfikir secara logis dan kritis dalam rangka mengembangkan profesionalisme sebagai guru; (3) bagi masyarakat, penelitian ini menjadi inspirasi dalam penelitian sejenis.

PRAKATA

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar Di India Tahun 1556 – 1605 M”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penulis telah berusaha maksimal dalam menyelesaikan skripsi, namun masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M. Sc, Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph. D.,selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember.
4. Dr. Nurul Umamah, M. Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
5. Drs. Sumarjono, M. Si., selaku dosen pembimbing I dan Drs. Sumarno, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis yang dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Marjono, M. Hum., selaku penguji I dan Drs. Kayan Swastika, M.Si., selaku penguji II terima kasih atas kritik, saran, dan masukannya;
7. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
8. Bapak/ibu Satimin dan Katiyah serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan serta do’a demi terselesaikannya skripsi ini;

9. Sahabatku Erva, Salis, Sisca, Aries, Fredani, Lilis, Hima, Ima, Riski, Zaini dan semua teman seperjuangan mahasiswa sejarah 2013 yang selalu menyokong dan memberi semangat.
10. Teman-teman Kos Hijau 139 dan Kosmik 39, telah memberikan dukungan, kerjasama, dan warna-warni kehidupan selama di Jember.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 22 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAM PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Heuristik	15
3.2 Kritik	16
3.3 Interpretasi	18
3.4 Historiografi	18
BAB 4. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JALALLUDIN MUHAMMAD AKBAR DI INDIA TAHUN 1556-1605 M.....	20

4.1 Faktor Politik.....	20
4.2 Faktor Ekonomi	21
4.3 Faktor Agama dan Seni.....	22
BAB 5. STRATEGI KEBIJAKAN POLITIK, SOSIAL-EKONOMI, AGAMA DAN SENI JALALLUDIN MUHAMMAD AKBAR DI INDIA TAHUN 1556-1605 M.....	24
5.1 Kebijakan di Bidang Politik.....	24
5.2 Kebijakan di Bidang Sosial-Ekonomi.....	37
5.3 Kebijakan di Bidang Agama dan Seni.....	42
BAB 6. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JALALLUDIN MUHAMMAD AKBAR DI INDIA TAHUN 1556-1605 M.....	50
6.1 Bidang Politik.....	50
6.2 Bidang Sosial-Ekonomi.....	52
6.3 Bidang Agama dan Seni.....	53
BAB 7. PENUTUP.....	57
7.1 Simpulan.....	57
7.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Matrik Penelitian.....	63
Lampiran B. Sketsa dan Foto-foto Bangunan Peninggalan Akbar.....	64
G.01. Sketsa lukisan Akbar dan Raja Birmal.....	64
G.02. Sketsa lukisan Man Singh.....	65
G.03. Lukisan Abu-l Fazl.....	66
G.04. Foto Bagian Istana Fathpur Sikri.....	67
G.05. Foto ukiran jendela di Fathpur Sikri.....	67
G.06. Kediaman Raja Birmal di Fathpur Skiri.....	68
G.07. Menara Chitor.....	68
G.08. Mihrab Masjid Jami' Mughal.....	69
G.09. Pintu Gerbang Istana Fahtpur Skikri.....	70
G.10. Pilar Menara Fathpur Sikri.....	71
Lampiran C. Peta Ekspansi Kerajaan Mughal di India Tahun 1556-1605 M.	72
Lampiran D. Bagan Silsilah Keluarga Timur Lenk.....	73
Lampiran E. Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran F. Data Informan.....	75
Lampiran G. Hasil Wawancara.....	76
Lampiran H. Biodata Peneliti.....	78

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan meliputi: (1) latar belakang; (2) penegasan judul; (3) ruang lingkup penelitian; (4) rumusan masalah; (5) tujuan penelitian; (6) manfaat penelitian. Berikut dipaparkan masing-masing.

1.1 Latar Belakang

India adalah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Negara India memiliki wilayah yang luas $\pm 3.287.590 \text{ km}^2$ yang didiami oleh penduduk dengan tingkat keberagaman suku, ras, agama dan warna kulit yang beragam. India adalah nama pemberian dari bangsa Barat (Inggris), aslinya yaitu *Hind* (Hindustan) yang terambil dari nama sungai Shindu (salah satu sungai besar di Benua India). India merupakan sebuah negara yang terkenal dengan ke Hindu-annya, akan tetapi pada abad ke 18 berhasil berdiri sebuah kekuasaan Islam terbesar di India dibawah kekuasaan Dinasti Mughal dan hal itulah menyebabkan akulturasi dan asimilasi budaya serta berkembangnya Islam di negara Hindustan (Thohir&Ading, 2006:53-54).

Bangsa Mughal merupakan kabilah-kabilah besar yang menyerupai sebuah bangsa pengembala, hidup secara nomadik dan lihai mengayuhkan pedang perang, yang berasal dari daratan Asia (daratan Mongolia) yang luas memanjang dari Asia Tengah, Siberia Selatan, Tibet Utara, dan Turkistan Timur. Kerajaan Islam Mughal dicetuskan Zaharuddin Babur pada tahun 1526 M, setelah berhasil menyingkirkan pemerintahan Kesultanan Delhi di India (Al-'Usairy, 2003:322-332). Jalalludin Muhammad Akbar dilahirkan di Amarkot, Sind Utara pada hari Kamis, 23 November 1542 A. C dari pernikahan Raja Nashiruddin Humayyun dan Ratu Hamida Bano. Sultan Akbar merupakan keturunan ketujuh dari Timur Leng. Humayyun adalah penerus Kerajaan Mughal setelah Zaharuddin Babur dari tahun 1526-1530 M. Humayyun mengalami pasang surut dalam sistem pemerintahan, pertarungan dengan saudaranya dalam perebutan kekuasaan memperceraikan persatuan dan melemahkan basis militer Mughal, selain hal itu puing-puing kekuasaan Afganistan bangkit kembali. Faktor-faktor tersebut

menghancurkan basis kekuasaan Mughal di India. Kehidupan sisa-sisa kerajaan Mughal harus berjalan dengan sistem pelarian dari satu wilayah ke wilayah lain (Erwin, 1990:37-38).

Kelahiran Akbar merupakan masa-masa gelap Kerajaan Mughal. Akbar mendapatkan pendidikan yang kurang memadai sehingga mengakibatkan tidak pandai dalam membaca atau menulis. Akbar memiliki seorang guru bernama Abu Fazl yang selalu mengajarnya akan tetapi dengan kondisi lingkungannya membawa dirinya lebih gemar berburu, menjinakan binatang (gajah), memanah dan memainkan sebilah pedang, kepandaian Akbar tersebut diperoleh dari pengalamannya melihat perang saat mendampingi ayahnya. Akbar merupakan seseorang yang lebih senang belajar dari alam dan sekitarnya daripada menggunakan teori. Akbar sangat cepat belajar dari lingkungannya, hal itu diungkapkan oleh sang guru yaitu Abu Fazl. Walaupun begitu dalam hal budi pekerti dan agama ibunya Hamida Bano serta merta menuangkan pengetahuan terhadap Akbar dan menjadikannya sebagai Muslim yang taat, adil dan bijaksana (Beveridge, 1907:519; Jaffar, 1936:72).

Berjalannya waktu tumbuh sifat tanggung jawab Akbar terhadap keluarganya dan masyarakat Mughal ketika berada ditempat pelarian. Selama masa pelarian Jalalludin Muhammad Akbar sering ditinggal ayahnya untuk merebut kembali tahta Delhi dari kekuasaan bangsa Afgan (Hamka, 1960:145). Akbar kecil mengasah bakat-bakatnya khususnya dalam bidang kemiliteran dan olahraga, hal ini tidak luput dari pantauan Humayun dan peran Bhairam Khan. Bhairam Khan ialah seorang perdana menteri dimasa Ayahnya dan kelak membantu Akbar dalam menaklukkan wilayah Hindustan. Secara geneologi sifat Akbar tidak berbeda dari kakek dan ayahnya, Babur dan Humayyun adalah panutan dalam jati diri Akbar. Selain itu bekal ilmu dari sang ibunya Hamida Bano selalu diterapkan oleh Akbar (Erwin, 1990:38-39).

Tahun 1545 M merupakan kemunculan kembali kekuasaan Islam Mughal di India setelah 13 tahun hidup dalam pelarian. Bantuan yang didapatkan dari Shah Thamas (Persia) berhasil merebut daerah Kabul kembali dan pada tahun 1554 M Humayyun berhasil merebut sebagian daerah kekuasaan di Delhi yang

pernah diduduki. Belum lama mencicipi singgasana Mughal di India pada tahun 1556 M hal buruk menimpa Humayyun. Humayyun terjatuh dari lantai perpustakaan dan tak lama kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir setelah bersusah payah berjuang merebut kembali daerah Hindustan. Kematian Humayyun menjadikan putra sematawayangnya yakni Jalalludin Muhammad yang masih berusia 14 tahun menduduki singgasana Mughal setelah memperingati upacara kematian ayahnya pada 14 Februari 1556 A. C. dengan gelar *Abu'l Fath Jalaluddin* atau *Sultan Akbar Khan* dan memegang tanggung jawab besar atas kedudukannya melindungi kerajaan Mughal (Jaffar, 1936:72-73).

Jalalludin Muhammad Akbar merupakan pemimpin yang memiliki gagasan-gagasan diktaktor dan liberal. Pemikiran Sultan Akbar Mughal berhasil mencapai kemajuan diberbagai bidang, Akbar disebut-sebut sebagai pencipta sistem Kerajaan Mughal yang sebenarnya. Ketidakstabilan diawal pemerintahan menjadi rintangan kepemimpinan Akbar, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan masyarakat Hindu, Hemu dan bangsa Afgan berhasil ditakhlukan Akbar yang dibantu oleh Bairam Khan, yang merupakan perdana menteri sekaligus orang kepercayaan Akbar dalam mempertahankan kekuasaan Mughal di India. Akbar menggunakan sistem pemerintahan pusat dengan militeristik dibawah perintah langsung Sultan dan menerapkan sistem perkawinan politik guna menghasilkan dukungan kepada kerajaan Mughal di India. Dalam pemerintahan Hindu dan Islam dimasukkan dalam satu wadah dewan untuk membangun India. Luas wilayah Mughal mencapai Hindustan, Punjab, Malwa dan Dekkan (Amstrong, 2001:170-171, Thohir, Ajid, dkk, 2006:95).

Kemajuan Mughal tidak terlepas dari peranan Akbar dalam menjalankan pemerintahannya. Akbar merupakan orang cerdas, strategi yang digunakan dibuat guna memberi keharmonisan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bidang agama sultan Akbar sangat toleran, berbeda dengan pendahulunya. Penerapan kebijakan politik *Sulh-e-kul*, yang mana semua rakyat dianggap sama dan tidak membedakan etnis, ras, maupun agama. Dari kebijakan tersebut dibuatlah undang-undang *Din Illahi* yang memiliki tujuan memupuk kesatuan dan persatuan antar golongan dibawah satu pemerintahan (Mubarok, 2004:211-212). Pendapatan

perekonomian Mughal diterapkan sistem pajak daerah wilayah atau *raiyatwari*, perdagangan, pertambangan dan pertanian dikembangkan guna meningkatkan ekonomi Mughal. Dimasa Akbar India dapat menerapkan ekspor barang dengan negara lain. Karya seni dan budaya dimasa Akbar sangat ditonjolkan, seperti karya sastra dan arsitektur yang mengagumkan yakni Fatpur Sikri, Masjid Jami', dan seni gambar (Yatim, 20113:150).

Akbar Semasa memerintah dikenal sebagai raja yang bijak dan adil, masyarakat India dan Mughal menjunjung tinggi kekuasaan Mughal dibawah Akbar. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Sultan Akbar di India semata-mata merupakan strategi didalam pemerintahan guna mendekatkan dirinya kepada masyarakat dan mengerti kehendak hati masyarakatnya, hal ini menjadikan keberhasilan selama 49 tahun pemerintahannya di India. Tanpa adanya Sultan Akbar, Islam Mughal tidak dapat berkembang dan mengalami masa kejayaanya di negara Hindustan. Puing-puing sisa bangunan Akbar menjadi saksi bisu perjuangannya di tanah Hindustan salah satunya yaitu bangunan Istana Fathepur Sikri. Dari hasil wawancara dengan Rashid Latief pada 20 Mei 2017, sisa-sisa keturunan bangsa Mughal masih terdapat hingga sekarang ini, terdapat di wilayah Pakistan yang berbatasan dengan India yaitu daerah Kashmir. Diketahui bahwasanya dimasa Sultan Akbar India dan Pakistan merupakan satu wilayah ditanah Hindustan, dari hasil analisis walaupun di Kashmir sebagian beragama Islam akan tetapi budaya yang diterapkan disana tidak terlepas atau adanya akulturasi dari budaya India. Hal ini diakibatkan oleh politik *Sulh-e-kul* dimasa pemerintahan Sultan Akbar yang menjadikan kesatuan antara Islam dan Hindu dan membawa budaya itu hingga dewasa ini.

Tahun 1605 M banyak tekanan yang dihadirkan dari Jehangir dan kebangkitan kaum Hindustan. Jehangir merupakan putra tunggal Akbar hasil perkawinan dengan putri Bihari Mall, menyusun aliansi pemberontakan terhadap Sultan Akbar yang bertujuan terhadap kedudukan tahta kerajaan Mughal. Pemberontakan Jehangir merupakan bentuk pembelotan bangsa Hindustan untuk menghancurkan kekuasaan Mughal. Karena hal itu Akbar jatuh sakit dan

menghembuskan nafas terakhir diusia ke 63 tahun dan dimakamkan di Sikandra (Erwin, 1990:39).

Penjabaran diatas menjabarkan kehidupan sosial-kultural Akbar yang menjadi titik penerapan sistem kebijakan pemerintahan yang dijalankan Jalalludin Muhammad Akbar tahun 1556-1605 M menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam. Strategi kebijakan pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar inilah yang menjadikan Mughal dapat menancapkan kembali kedudukan Mughal dan menjadikan Hindustan (India) sebagai daerah maju dimasanya, Jalalludin Akbar mengadopsi sistem yang dijalankan pendahulunya akan tetapi disesuaikan dengan kepentingan daerah wilayahnya agar tujuan utama Mughal dapat terlaksanakan yaitu menyatukan seluruh Benua India dibawah kekuasaan Kerajaan Mughal. Kebijakan yang dijalankan Akbar digunakan acuan oleh penerus setelahnya hingga sampai kedudukan Inggris di India.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji secara dalam mengenai kebijakan pemerintahan kerajaan Mughal di India di bawah Jalalludin Muhammad Akbar (1556-1605 M) di bidang politik, sosial-ekonomi, agama dan seni, maka dari itu peneliti tertarik untuk memilih judul “**Kebijakan Pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India Tahun 1556-1605 M**”

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul merupakan hal yang penting untuk menghindari pemahaman yang beragam dari judul yang dikemukakan. Penulis merasa perlu dan penting memberikan penegasan pengertian judul skripsi yaitu “Kebijakan Pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar di India Tahun 1556-1605 M”. Kebijakan Pemerintahan adalah segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk guna mencapai tujuan negara. Pemerintahan memiliki arti kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara (Pamudji, 1995:23). Di dalam sebuah pemerintahan dibutuhkan peran tokoh atau pemimpin untuk

mengatur sistem pemerintahan bisa seorang raja, perdana menteri, ataupun kepala negara. Peran sendiri diartikan sebagai tindakan oleh seseorang di suatu peristiwa.

Jalalludin Muhammad Akbar merupakan raja ke tiga Kerajaan Mughal di India, setelah menggantikan tahta ayahnya Nashirudin Humayyun. Akbar merupakan sosok pemimpin yang keras dan liberal namun memiliki kerendahan hati, bijaksana dan toleransi dalam menjalankan pemerintahannya dan menjadikan Akbar dapat diterima di tanah Hindustan dan Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya. Kepemimpinan Akbar di India berlangsung selama 49 tahun dari 1556-1605 M (Hamka, 1960:145).

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud Pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 adalah menganalisis kebijakan pemerintahan yang diterapkan Jalalludin Muhammad Akbar pada tahun 1556-1605 M yang dikaji dalam empat bidang yaitu politik, sosial-ekonomi, agama, seni dan budaya.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini ditujukan untuk menghindari penyimpangan dari materi kajian yang di teliti oleh peneliti. Ruang lingkup penelitian yang dimaksud meliputi ruang lingkup tempat (spasial), ruang lingkup waktu (temporal), dan ruang lingkup objek kajian atau materi.

Ruang lingkup tempat (spasial) kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada negara Hindustan (India) dikarenakan kekuasaan dan penerapan kebijakan pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar dijalankan di India, jika ditarik kemasa sekarang daerah tersebut menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan. Lingkup waktu (temporal) peneliti memulai mengkaji di tahun 1556 M sampai dengan 1605 M. Pemilihan tahun 1556 M merupakan awal Jalalludin Muhammad Akbar dikukuhkan menjadi Sultan Mughal setelah menggantikan kedudukan ayahnya yaitu Sultan Humayun, sedangkan pemilihan tahun 1605 M adalah peristiwa meninggalnya Sultan Akbar dan menjadikan berakhirnya pemerintahan yang diterapkannya dan digantikan Jehangir.

Ruang lingkup kajian materi penekanannya pada peran Jalalludin Akbar menjalankan sistem pemerintahannya di India yang dikaji dari beberapa bidang antara lain bidang politik, sosial-ekonomi, agama, maupun seni.

1.4 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan ruang lingkup seperti yang tersaji diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji di dalam karya tulis ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana latar belakang kebijakan pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M?
- 2) Bagaimana strategi kebijakan politik, sosial-ekonomi, agama dan seni Jallaludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M?
- 3) Apa dampak kebijakan pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M?

1.5 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penulisan karya tulis ini ialah:

- 1) Mengkaji latar belakang kebijakan pemerintahan Kerajaan Mughal di India tahun 1556-1605 M;
- 2) Mengkaji peranan Jallaludin Muhammd Akbar dalam menerapkan kebijakan pemerintahan Kerajaan Mughal di India tahun 1556-1605 M;
- 3) Mengkaji hasil yang dicapai Jallaludin Muhammad Akbar dalam menjalankan kebijakan pemerintahan Kerajaan Mughal di India dan dampak kebijakan yang diterapkan terhadap masa sekarang ini.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik bagi semua kalangan masyarakat, sehingga berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana yang tersaji diatas, maka hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi perkembangan ilmu kesejarahan, memberi kontribusi nyata atas penelitian yang telah dilakukan sebagai pemer kaya khasanah keilmuan kesejarahan;
- 2) Bagi almamater, bermanfaat sebagai upaya pengalaman Tri Darma Perguruan Tinggi;
- 3) Bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memberi wawasan mengenai Kebijakan Pemerintahan Kerajaan Mughal di bawah kepemimpinan Jallaludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M;
- 4) Bagi pembaca dan masyarakat luas, dapat dijadikan referensi bacaan mengenai Kebijakan Pemerintahan Kerajaan Mughal di bawah kepemimpinan Jallaludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M;
- 5) Bagi penulis, memberi pengalaman serta mengasah kemampuan dalam menulis karya tulis ilmiah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meninjau kembali penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan kajian pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M. Bab ini juga mengemukakan pendekatan maupun teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

Shabnam Bharti (2016:150-154) di P.G Department of History Guru Nanak Girls College dengan judul "*The Rajput & Religious Policy Of Akbar The Great*". Mengulas kebijakan agama yang dijalankan Jalalludin Muhammad Akbar ditahun 1556-1605 M. Kebijakan Akbar didasari pada kepentingan politik dan untuk mempertahankan kekuasaan di tanah India. Akbar adalah penganut Islam yang liberal. Bangsa Rajput adalah suatu suku asli India yang memiliki kasta kesatria, dengan adanya aliansi dengan bangsa Rajput akan mempermudah Mughal menguasai wilayah India. Akbar diawal pemerintah merupakan pemimpin yang ortodox, guna melunakkan hati Rajputana Akbar memilih merevolusi kepemimpinannya di India. Kepemimpinannya merupakan yang berhasil dibanding ayah dan kakeknya, Islam dapat berbaur seiring dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan Sultan Akbar seperti, toleransi agama, perkawinan politik (dengan tidak ada paksaan dengan pihak Mughal), menjadikan hubungan politik dengan bangsa Rajput yang nantinya bangsa Rajput membantu perluasan wilayah maupun penakhlukan daerah-daerah sekitar. Penelitian Bharti juga mengulas sedikit tentang penerapan UU *Din Illahi* yang merupakan suatu produk yang dimunculkan dari sistem politik Akbar. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Shabam Bharti difokuskan pada bidang politik Akbar dikawasan Rajputana. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi peneliti dalam menulis karya ilmiah ini serta peneliti mampu mengembangkan dan mengkaji secara luas pemerintahan Akbar dalam berbagai bidang yaitu politik, sosial-ekonomi, seni dan agama.

Penelitian yang dilakukan Fahremi Imri (2014:223-224) berjudul "*Dinamika Politik Dan Pemerintahan India*". Penelitian ini memaparkan kebijakan pemerintahan di bidang politik yang dilakukan kerajaan-kerajaan

Hindu, Mughal hingga kedatangan Inggris. Sistem pemerintahan dibawah kepemimpinan Sultan Akbar adalah sentralisasi yang mana penyerahan dan wewenang kekuasaan berada ditangan pemerintah pusat, kemajuan yang dicapai Akbar juga dapat dilihat dari wilayah kekuasaan yang berhasil diduduki Mughal yang mencapai wilayah India bagian Barat luas batas wilayah Mughal yang hampir mencapai seluruh dataran India, wilayah kekuasaan Mughal dibagi 15 propinsi dan pemerintahan yang dijalankan adalah sentralisasi. Mughal di bawah kepemimpinan Akbar mengalami kemunduran pada abad ke-18 dengan ditandai adanya pemberontakan dan kedatangan Bangsa Eropa yang mulai melakukan kolonialisasi. Hasil penelitian Fahremi Imri memfokuskan kajian dalam penerapan bidang politik Akbar, namun terdapat beberapa hal yang belum dimunculkan dalam penelitian ini, seperti strategi politik dengan penerapan sistem perkawinan politik dan pembentukan administrasi negara dimasa Jalalludin Muhammad Akbar. Secara umum, hasil penelitian ini lebih menjabarkan tata letak wilayah kekuasaan Mughal dan strategi guna mempertahankan kekuasaan hingga merosotnya wilayah kekuasaan pemerintahan Sultan Akbar dikarenakan kedatangan bangsa Eropa ke India. Oleh karena itu kekurangan dan kelebihan tersebut, hasil penelitian ini dijadikan salah satu acuan sumber dalam penelitian peneliti dan akan disempurnakan dengan kajian yang lebih luas yang akan peneliti lakukan.

Menurut penelitian Afdol Faris (2015) berjudul ”*Politik Sulh-e-Kul Sultan Akbar Pada Masa Dinasti Mughal Di India Tahun 1560-1605 M*”. Mughal merupakan Dinasti Islam yang dapat bertahan lama di India. Peranan Akbar dalam pemerintahan Mughal melambungkan Mughal ke puncak kejayaan. Pemerintahan Akbar mengalami kemajuan diberbagai bidang yaitu kesenian dan pendidikan dengan mendirikan sekolah Indo-Persia dan arsitektur. Ketidakstabilan pemerintahan Mughal di India mengakibatkan penerapan politik *Sulh-e-kul* Akbar merupakan kebijakan yang menjadikan rakyat India dan Mughal memiliki hak yang sama. Politik *Sulh-e-kul* mempengaruhi penerapan kebijakan pemerintahan Akbar terutama pada bidang politik yaitu jabatan pemerintahan kepemimpinan Akbar diberikan atas semua golongan sesuai dengan keahlian yang

dimiliki, dan bidang agama yang memunculkan *Din-Illahi*. *Din Illahi* merupakan produk dari politik *Sulh-e-kul* yang berisi bahwa India saling bertoleransi antar agama, hal ini dikarenakan di India berkembang beberapa agama yaitu Hindu, Islam, Budha, Jain, Zoroaster, Yahudi dan Nasrani yang memunculkan kebijakan toleransi agama yang dijalankan Akbar dan menimbulkan rasa empati masyarakat India dan menerima kepemimpinan Mughal atas India. Penelitian yang dilakukan Afdol Faris memfokuskan kajian penelitian pada penerapan bidang politik Akbar. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan salah satu sumber informasi terkait dengan penerapan sistem politik *Sulh-e-khul* dan digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian peneliti dibidang politik dan agama.

Penelitian Gurpreet Singh (2016:36-37) "*Religious Policies of Emperor Akbar and Emperor Aurangzeb-an Analysis*". Penelitian Singh memaparkan analisis kebijakan agama Akbar (1556-1605) dan Aurangzeb (1618-1707). Akbar merupakan keturunan bangsa Mughal yang menganut Islam Radikal. Kebijakan yang dilakukan Sultan Akbar di India dibentuk dan dimotivasi orangtuannya serta warisan sosial. Lingkungan sosial-politiknya mempengaruhi kebijakan yang diterapkan. Kebijakan yang diterapkan Akbar adalah *Sulh-e-kul*. *Sulh-e-kul* merupakan kebijakan yang mengarah pada toleransi beragama, Sultan Akbar sadar bahwa dengan penggunaan toleransi beragama dapat menjadi penyatuan India dibawah Mughal. Kebijakan yang diterapkan Akbar merupakan kebijakan yang terbaik dalam mengatasi perbedaan suku, bangsa, dan agama, akan tetapi kebijakan politik tersebut disalahgunakan oleh masyarakat maupun pengikutnya dan menumbuhkan benih-benih konflik diantar masyarakatnya. Penelitian yang dilakukan Gurpreet Singh memfokuskan kajian penelitian pada bidang politik *Sulh-e-khul* Sultan Akbar. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan salah satu sumber referensi penulisan karya ilmiah peneliti.

Penelitian Kalam Chouhan (2014) berjudul "*The Rajput Policy Of Famous Mughal Emperor Akbar And Aurangzeb*". Rajput merupakan bangsa Hindu dari kasta ksatria. Rajput membuat hubungan dengan Mughal melalui aliansi pernikahan dan Mughal memberi kedudukan terhadap bangsa Rajput.

Kebijakan lain Akbar adalah penghapusan pajak ziarah karena dianggap mengandung unsur diskriminasi agama. Kebijakan yang diterapkan menjadikan hubungan perdamaian antara Mughal dan Rajput, dan memberikan dukungan terhadap pemerintahan Mughal dibawah kepemimpinan Akbar. Menurut penelitian Chouhan, keberhasilan pemerintahan Mughal di India tidak akan tercapai jika tidak ada campur tangan bangsa Rajput. Peran bangsa Rajput memang sangat penting bagi pemerintahan Mughal karena membantu memperkuat basis militer dari kerajaan Mughal, Penelitian Chouhan memiliki kelebihan menganalisis secara dalam peran Bangsa Rajput guna memperluas kekuasaan Mughal di India dan memberikan informasi dukungan terhadap peneliti dalam mengkaji secara dalam kebijakan politik dan ekonomi yang dilaksanakan Sultan Akbar di tahun 1556-1605 M.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu berkenaan dengan penerapan kebijakan Jalalludin Muhammad Akbar di India dapat ditarik kesimpulan bahwa sepenuhnya belum dibahas secara mendalam dan masih terdapat celah atau ruang bagi peneliti untuk mengkajinya dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yakni mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian ini diantaranya: (1) penelitian ini menganalisis latar belakang munculnya kebijakan pemerintahan Akbar di bidang politik, sosial-ekonomi, seni dan agama, (2) peneliti mengkaji tentang penerapan sistem kebijakan Akbar di bidang politik, sosial-ekonomi, seni dan agama, (3) peneliti mengkaji mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Sultan Akbar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik. Politik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Sedangkan sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, jadi sosiologi politik merupakan pendekatan yang mengkaji tentang fenomena kekuasaan, kewenangan, kehidupan politik, pemerintahan serta Kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara atau kelompok manusia (Dauverger, 1996). Sosiologi Politik digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan Kebijakan pemerintahan Sultan

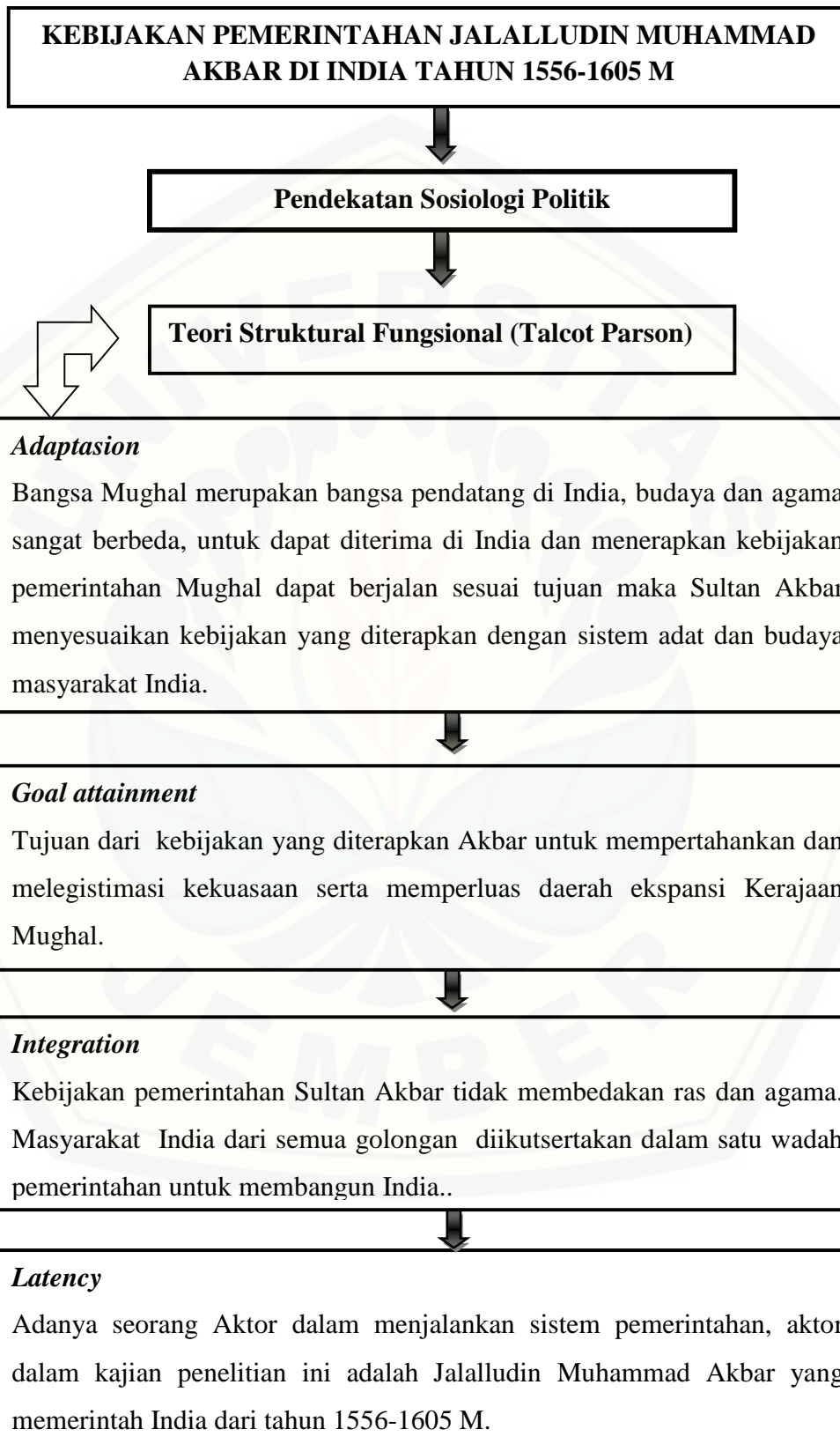
Akbar di India tahun 1556-1605 M. Hal ini didasari pada setiap kebijakan yang diterapkan Akbar di tanah Hindustan tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan yang dijalankan Sultan Akbar, dengan semakin kuatnya sistem pemerintahan politiknya dapat mempertahankan kekuasaan Mughal dan melegitimasi kekuasaannya guna mengembangkan pemerintahan Kerajaan Mughal di India. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Struktural Fungsional

Teori struktural Fungsional memiliki asumsi bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berlaku fungsional terhadap struktur yang lainnya, dan jika struktur tersebut tidak berfungsi maka struktur tersebut akan hilang dan tergantikan dengan sendirinya (Ritzer, 2014:114-116). Kebijakan pemerintahan Kerajaan Mughal di India dapat berjalan baik karena adanya tokoh yang menjalankan sistem pemerintahan yang sesuai dengan struktur masyarakat India yaitu Jalalludin Muhammad Akbar. Sistem kebijakan yang diterapkan berdasarkan adanya proses dari akulturasi dan asimilasi budaya. Perubahan tersebut mempengaruhi cara masyarakat memahami berbagai realitas kehidupan baik budaya, sosial, ideologi, agama, maupun politik.

Pemikiran Talcott Parsons (dalam Ritzer, 2014:117) diperlukan empat fungsi agar sistem dapat berjalan dan bertahan yang diterapkan dalam skema AGIL, berikut penjelasannya.

- 1) *Adaptation* (adaptasi) yaitu suatu sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhan.
- 2) *Goal attainment* (pencapaian tujuan) yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- 3) (Integrasi) Suatu sistem harus mengatur antar-hubungan bagian antar komponennya.
- 4) *Latency* (pemeliharaan pola) yaitu sebuah harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural dan menopang motivasi dan dalam menjalankan sistem ini dipilihlah aktor yang dapat menjalankan sistem.

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985:32). Metode sejarah memiliki empat langkah dalam melakukan penelitian sejarah yaitu (1) Heuristik, (2) kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.

3.1 Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah heuristik. Pada tahap ini penulis mengumpulkan literatur-literatur yang sesuai dengan topik yang dikaji yaitu kebijakan pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M. Sumber yang dikumpulkan terdiri dari dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Menurut bahannya sumber dibagi menjadi dua yaitu (1) sumber tertulis merupakan sumber dokumen yang berupa buku-buku, koran maupun surat-surat, (2) sumber benda, diperoleh dari produk kegiatan-kegiatan manusia yang memuat informasi tentang kehidupan manusia berupa bangunan-bangunan, lukisan-lukisan sejarah, perkakas, mata uang dan lain sebagainya (Kuntowijoyo, 1995:73-75).

Pengumpulan Sumber Primer tidak dapat ditemukan oleh peneliti, akan tetapi peneliti menemukan sebuah sumber sekunder yang ditulis oleh Beveridge (1939) berjudul *The Akbar Nama Of Abu-f-Fazl* yang merupakan hasil kajian atau analisis dari kumpulan-kumpulan primer yang ditulis oleh seorang *wasir* atau menteri dipemerintahan dan sekaligus menjadi guru setia Sultan yaitu *Abu-l-Fazl. Abu-l-Fazl*. Kesetiaannya menjadikan *Abu-l-Fazl* menulis buku tentang kebijakan politik Akbar. sumber lain yang berhasil peneliti temukan untuk mengkaji penelitian ini *Akbar The Great Mogul 1542-1605*, bukunya Vincent A. Smith (1917) menjelaskan proses perjalanan Akbar dari lahir hingga menjadi seorang raja yang Agung di India; *The Mughal Empire From Babar To Aurangzeb*, karya S. M. Jaffar (1936) pemfokusan pada kajian Akbar di bidang politik, agama dan kesenian; *Akbar, Emperor of India* karya Richard Von Garbe (1909); *The*

Caliphate, karya Sir Thomas W. Arnold (1924); *Sejarah Umat Islam*, karya Hamka(1960); *Islam: Sejarah Singkat* karya Karen Amstrong (2002) memaparkan tentang kajian sejarah Bangsa Mughal hingga ekspansi Mughal ke wilayah Asia Selatan.

Penelitian ini juga menggunakan sumber benda berupa bangunan peninggalan Kerajaan Mughal di India pada masa pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar. Data yang didapat dibuktikan berdasarkan hasil respondensi dengan beberapa narasumber. Selain itu juga ada sketsa lukisan yang dibuat pada masa pemerintahan Akbar yang tertuang pada beberapa buku yang teliti oleh peneliti Inggris yang berkedudukan di India.

Pada tahap ini peneliti juga menemukan sumber lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian terdahulu yaitu *The Rajput & Religious Policy Of Akbar The Great*, karya Shabnam Bharti; *Religious Policies of Emperor Akbar And Emperor Aurangzeb-an Analysis*, karya Singh Gurpreet; *The Rajput Policy Of Famous Mughal Emperor Akbar And Aurangzeb*, karya Kalam Chouhan; *Politik Sulh-e-Kul Akbar Pada Masa Dinasti Mughal Di India Tahun 1560-1605 M*, karya Afdol Faris; Penelitian lain yang berhubungan dengan kajian pemerintahan Sultan Akbar di India, peneliti mendatangi tempat-tempat yang terdapat sumber yang penulis butuhkan. Sumber-sumber tersebut didapatkan di perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan sejarah Kelamas, perpustakaan STAIN Kediri, perpustakaan IAIN Jember, dan koleksi pribadi penulis.

3.2 Kritik

Kritik sumber meruapakan suatu tindakan menyeleksi sumber-sumber yang telah ditemukan melalui tahapan ekstern dan intern adanya kegiatan kritik dalam penelitian sejarah disebabkan karena sifat tidak percaya terhadap suatu sumber. Kritik sumber didalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan keaslian sumber (otentisitas) dan keabsahan sumber untuk dapat dipercaya (kredibelitas), yang menggunakan dua tahapan yaitu melalui kritik ekstern dan intern.

Mendapatkan suatu otentisitas (keaslian sumber) peneliti menggunakan tahapan kritik ekstern yang merupakan suatu penelitian fisik terhadap suatu sumber yang diperoleh. Menurut Gottschalk (1975:82-85) kritik ekstren meliputi usaha sejarawan menerka tanggal dokumen, anakronitis materi, tinta yang digunakan, pengaran, tulisan tangan, tanda tangan, materai, jenif huruf dan sebagainya. Berkaitan dengan kajian penelitian ini, kritik ekstern mengacu pada kritik terhadap sumber-sumber tertulis di dalam penelitian ini atau dengan kata lain, kritik ekstern dari penelitian ini aksentuasinya pada suatu usaha guna mengetahui otentisitas dari sumber yang digunakan yang peneliti peroleh dari perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan sejarah Kelamas, perpustakaan STAIN Kediri, perpustakaan IAIN Jember, dan koleksi pribadi penulis. Otentisitas diketahui setelah peneliti melakukan kegiatan memilah-milah sumber yang didapat yaitu tentang kajian kebijakan Pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M dengan melihat dari sisi luar buku seperti melihat bahan (kertas) yang digunakan sesuai dengan tahun terbit atau tidak, judul sumber, latar belakang pengarang sumber, hal itu digunakan penulis untuk mengetahui sumber yang diperoleh sudah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan penelitian skripsi ini.

Setelah melakukan tahapan kritik ekstern peneliti kemudian melakukan tahapan kedua yakni kritik intern yang digunakan untuk mendapatkan kredibilitas sumber (sumber sudah dapat dipercaya). Kritik ekstern mengacu pada isi dokumen yang digunakan untuk memahami teks. Peneliti melakukan penyaringan kualitas informasi yang didapat dari jejak-jejak maupun sumber-sumber sejarah dan membandingkan tiap esensi atas informasi dari masing-masing sumber sehingga diperoleh sumber yang kredibel dan autentik, jadi kritik intern lebih digunakan untuk menilai keakuratan terhadap materi sumber sejarah dengan membaca, mempelajari, memahami, memilah dan menelaah sumber-sumber sejarah yang digunakan yang sesuai dengan kajian penelitian Kebijakan Pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M.

3.3 Interpretasi

Setelah dilakukan kritik sumber dilakukan tahap kegiatan selanjutnya yakni interprestasi. Kegiatan interprestasi ada dua tahap yaitu analisis dan sintesis. Peneliti melakukan analisis terhadap sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interprestasi yang menyeluruh. Sintesis merupakan proses penyatuan data-data yang dikelompokkan menjadi satu kemudian disimpulkan, jadi proses ini melakukan penyatuan atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan mengenai Kebijakan Pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India Tahun 1556-1605 M dan disusun fakta-fakta tersebut kedalam suatu interprestasi yang menyeluruh (Kuntowijoyo, 1995:78-80, Abdurrahman, 2007:73).

Interprestasi dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang kemudian dirangkai dan dihubungkan menjadi suatu bentuk yang logis, rasional, objektif, dan kausalitas. Fakta-fakta yang terkumpul dirangkai secara kronologis sehingga diperoleh cerita sejarah yang logis dan sesuai realitas yang ada tentang mengenai Pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di Inida Tahun 1556-1605 M.

3.4 Historiografi

Tahap historiografi peneliti merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode sejarah (Gottschalk, 1985:32). Peneliti melakukan penulisan cerita sejarah mengenai Kebijakan Pemerintahan Jallaludin Muhammad Akbar di India Tahun 1556-1605 M dengan cara merangkai fakta-fakta yang telah didapatkan menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional dan objekif. Kemudian melakukan penyusunan sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Penyajian hasil penelitian sejarah ini terdapat tujuh bab. (1) Bab 1. Pendahuluan memaparkan latar belakang penelitian, penegasan judul; ruang lingkup permasalahan penelitian yang terdiri dari tempat (spasial), waktu

(temporal), dan objek kajian materi; rumusan masalah; tujuan penelitian; dan manfaat penelitian. (2) Bab 2. Tinjauan pustaka yang memuat hasil review penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M. Pendekatan dan teori-teori yang sesuai digunakan dalam mengkaji objek studi yang dijadikan fokus penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik dari Maurice Dauverger dan teori struktural fungsional dari Talcot Parson sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan masalah. (3) Bab 3. berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. (4) Bab 4. Mengulas mengenai latar belakang penerapan sistem kebijakan politik, sosial-ekonomi, agama dan seni Sultan Akbar setelah berhasil menduduki kekuasaan di India pada tahun (1556 M- 1605 M). (5) Bab 5. Mengulas kebijakan-kebijakan yang diterapkan Sultan Akbar selama memerintah di India antara lain kebijakan politik dengan penerapan politik *Sulh-e-kul*, kebijakan sosial-ekonomi dengan penerapan sistem ekonomi perdagangan, industri, dan penerapan pajak dan pada bidang sosial dihapuskannya sistem kelas, bidang agama penggunaan UU *Din Illahi* dan bidang seni memunculkan kesenian identitas Mughal dari bahasa, karya sastra maupun seni bangunan. (6) Bab 6. Mengulas tentang dampak yang dirasakan di negara Hindustan (India) setelah penerapan kebijakan pemerintahan politik, sosial-ekonomi, agama dan seni. (7) Bab 7. Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikaji.

**BAB 5. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JALALLUDIN MUHAMMAD
AKBAR DI INDIA TAHUN 1556-1605 M DI BIDANG POLITIK,
SOSIAL-EKONOMI, AGAMA DAN SENI**

Jalalludin Muhammad Akbar sebagai penerus mewarisi darah keturunan Humayun yang merupakan raja Mughal pra Akbar, akan tetapi terpilihnya sebagai raja Hindustan adalah usaha kerasnya meyakinkan hati masyarakat dan peran serta masyarakat Mughal dan daerah yang mendukungnya. Setelah terpilihnya sebagai Sultan Mughal atas dataran Hindustan Akbar pun segera menjalankan kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk menstabilisasikan negara, menyejahterakan masyarakat, serta menumbuhkan keharmonisan bermasyarakat di dalam pemerintahannya. Akbar memimpin Mughal kurang lebih sekitar 49 tahun dan mendapatkan kemajuan dipemerintahannya yang menjadi dasar bentuk pemerintahan dan budaya Mughal di India yang akan diadaptasi oleh para penerusnya. Bab ini memaparkan hasil dari penelitian tentang kebijakan pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 yang mengkaji lebih dalam pada bidang politik, sosial-ekonomi, agama dan seni-budaya.

5.1 Kebijakan di Bidang Politik

Usaha pertama Jalalludin Akbar setelah menggantikan ayahnya adalah merebut kembali daerah kekuasaan yang pernah diduduki oleh Humayun (1530 M – 1556 M) dan Babur (1482 M – 1530 M), serta melanjutkan kembali ekspansi wilayah guna memperkuat pertahanan Mughal. Salah satu keberhasilan Mughal di bidang politik dapat dilihat dari berbagai wilayah yang ditakhlukan serta merta penerapan kebijakan (tatanan pemerintahan) yang dijalankannya.

5.1.1 Ekspansi Wilayah di India

Pada tahun 1556 M merupakan tahun awal kepemimpinan Mughal dibawah kuasa Akbar, daerah kekuasaan Sultan Akbar hanya terbatas wilayah Punjab. Punjab merupakan daerah yang terakhir ditinggalinya bersama sebagian

masyarakat Mughal dan daerah ini berhasil dipertahankan dari gempuran Sher Shah Khan yaitu kepemimpinan bangsa Afganistan di India yang ingin mengembalikan eksistensi pemerintahannya di India, akan tetapi berhasil dihalau oleh Sultan Akbar dan pasukannya. Semasa memerintah, daerah yang ditakhlukan Ayahnya diantaranya Delhi, Agra dan Gwalior akan tetapi belum lama menghirup udara kejayaan dan membawa keluarganya ke Delhi, Humayyun harus meregang nyawa karena sakit yang disebabkan jatuh saat menaiki tangga diperpustakaan pribadinya. Sepeninggalnya Humayyun puing-puing sisa penguasa Afganistan yang masih berada di India yaitu Dinasti Sur dan Hemu merebut kembali wilayah kekuasaan Dinasti Mughal (Jaffar, 1936:73).

Mengembalikan kekuasaan Mughal Akbar remaja dibantu dengan dukungan dan keberanian perdana menteri setianya yaitu Bairam Khan segera menyusun strategi penyerangan ke Delhi di tahun 1557 M dengan sisa 20.000 pasukan, ditengah perjalanan pasukan Hemu di bawah Muhammad Adil Khan menyerang pasukan Mughal di Panipat yang jumlahnya lebih besar dari pasukan Mughal yaitu 100.000 tentara bersenjata dan 500 pasukan gajah. Ketidakseimbangan pasukan memukul mundur pasukan Mughal untuk menunda penyerangan, akan tetapi pasukan Hemu semakin mengejar keberadaan pasukan Mughal dan mempersempit jalan keluar. Keyakinan dari Bairam Khan, Akbar mengambil keputusan untuk maju melawan pasukan Hemu, peperangan tidak dapat terelakkan lagi dan ini menjadi perang pertama Akbar setelah dikukuhkan menjadi seorang raja. Keahlian tentara Mughal pasukan Hemu berhasil ditakhlukan oleh Akbar dengan akhir pemenggalan kepala pemimpin dari Bangsa Hemu oleh Bhairam Khan, walaupun harus kehilangan lebih dari separuh pasukan militernya

Berakhirnya peperangan dengan Hemu di Panipat menggugah Bhairam Kham segera mengirim pasukan Mughal untuk segera menyerang daerah Aoud, Bihar dan Benggala yaitu daerah kekuasaan bangsa Hemu (Afgan), setelah mengirim pasukan dengan mudah sisa-sisa daerah Hemu berhasil dilumpuhkan, Akbar berhasil menguasai daerah tersebut, kekosongan kepemimpinan mengibaratkan daerah-daerah tersebut seperti anak yang kehilangan induknya dan

hal inilah yang mempermudah pasukan Akbar merebut wilayah Aoud, Bihar dan Benggala. Pusat Pemerintahan Mughal ditetapkan di Delhi yang berpusat di Agra. Peristiwa ini disebut dengan perang Panipat (Sokah, 1994:39; Hamka, 1960:145-146).

Kemenangan Mughal atas Afganistan menjadi pintu masuk ke India sekaligus titik awal perjuangan Akbar dan pasukannya mendapatkan legitimasi kekuasaan di tanah Hindustan, perlawanan terbesar Mughal sendiri berasal dari penduduk aslinya yaitu kekuatan kerajaan Hindustan, terutama pasukan Rajputana yang terkenal dengan keahlian di dalam medan peperangan. Mendengar kembalinya kekuasaan Dinasti Mughal di India membangunkan pasukan Hindu guna menghalau kebangkitan kekuasaan kerajaan yang didirikan Zaharudin Babur tersebut. Usaha menghalau serangan besar yang hadir dari bangsa Hindu, strategi awal Akbar adalah menggunakan jalan diplomasi yaitu surat perdamaian yang berisi bahwa kerajaan-kerajaan di tanah Hindustan harus tunduk dan pantuh dibawah aliansi kerajaan Mughal. Akbar sangat berhati-hati dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Hindu (Rajput). Rajput merupakan bangsa dengan kekuatan militer yang kuat dan Akbar memandang bahwa kegagalan pendahulunya dalam menguasai India adalah akibat tidak adanya hubungan kerjasama yang baik dengan bangsa India.

Surat perdamaian Sultan Akbar tidak mendapat banyak respon baik bagi maharaja-maharaja Hindu, pada akhirnya pada tahun 1558 M pecalah peperangan pertamanya melawan maharaja Jawaliur, dengan bantuan Bairam Khan dengan gesit pasukan Mughal berhasil menakhlukan Jawaliur, kebringasan Bairam Khan dalam peperangan tidak mengenakan hati Akbar. Akbar tidak menginginkan banyak pertumpahan darah dalam penakhlukan wilayah, pemberian ampunan terhadap lawan yang kalah perang dengan membuat hubungan kerjasama merupakan rencana Akbar untuk memperluas daerah wilayah sekaligus basis militer, karena dengan basis militer yang kuat maka kerajaan tersebut akan disegani dan ditakuti. Rencana Akbar tidak begitu mendapat persetujuan dari Bhairam Khan yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi Mughal yang keras dan menjadikan perdana menteri kesayangannya semakin jauh dari Sultan. Hasutan

sepupunya yaitu Adam Khan anak dari ibu angkatnya (Maham Anga), Jalalludin Muhammad Akbar menegur perbuatan dari perdana menterinya. Mendapatteguran dari Sultan Akbar, Bairam Khan membuat sebuah pembelotan atas kebijakan Mughal pada tahun 1560 M, peperangan antar keduanya tak dapat dihindari, akan tetapi Akbar dapat melumpuhkan Bhairam di Jullandur dan memberikat titah agar Bhairam ke Mekkah untuk berhijrah. Ditengah perjalanan Bairam Khan dihadang oleh sisa-sisa pasukan bangsa Afgan dan terbunuh dalam serangan tersebut. Bairam Khan sendiri merupakan orang yang setia terhadap Akbar dan Ayahnya akan tetapi kebrutalannya membawanya pada nasib yang buruk. Sepeninggalnya Bairam Kham tahun 1561 M Akbar mengirimkan sepupunya yaitu Adam Khan untuk merebut kembali kekuasaan Malwa yang pernah terlepas pada tahun 1547 M, dengan basis kekuatan militer Mughal daerah Malwa berhasil direbut kembali dan Adam Khan diangkat sebagai gubernur (*salar*) di Malwa, akan tetapi jabatan yang diberikan Akbar disalahgunakan oleh Adam Khan. Keserakahan dan kesewenangan Adam Khan dengan kekuasaan membawanya pada lingkaran hitam, Adam melakukan korupsi besar-besaran, memperkosa para gadis menumbuhkan kemurkaan Akbar. Mendengar kemarahan Akbar, Adam melakukan segala cara untuk menutupi tindakannya tersebut hingga mekukan pembunuhan terhadap orang kesayangan Akbar yaitu salah satu menteri setianya dan akhirnya Adam Khan harus menerima ganjaran atas tindakannya dengan hukuman dijatuhkan dari lantai dua istana Mughal berulang kali sampai tidak bernyawa kembali (Sokah, 1994:39; Yatim, 2013:149).

Perluasan wilayah yang dijalankan Akbar tetap berlanjut dan bertekad menjadi penguasa Hindustan dan menjadikan Mughal menjadi kerajaan terkuat di kawasan India, walaupun banyak kepahitan penghianatan dari orang terpercaya dan terdekat selama memerintah Kerajaan Mughal. Jatuhnya Malwa ketangan Mughal merupakan keberuntungan besar bagi Mughal bahwasanya Malwa adalah basis kekuatan terbesar Maharaja Hindu yang lain. Pada tahun 1562 M Raja Birbal (lihat halaman 64), pemimpin Jaipur (salah satu kerajaan Bangsa Rajput) dengan senang hati beraliansi dengan Mughal. Raja Birbal mengambil keputusan tersebut untuk menyelamatkan rakyatnya agar tidak terjadi pertumpahan darah

lebih besar. Aliansi tersebut terdengar hingga ketelinga para maharaja-maharaja Hindu dari golongan Bangsa Rajput (ksatria) dan menyebabkan kemurkaan. Tahun 1568 M, Udai Singh pemimpin Kerajaan Chitor melakukan perlawanan dibawah panglima Jai Mall, pada 23 Februari 1568 M Kerajaan Chitor dan Kerajaan Mughal terjadi pergolakan peperangan yang tidak bisa dihindarkan, akan tetapi dengan basis kekuatan Mughal yang semakin kuat berhasil mengalahkan Chitor dengan terbunuhnya Jai Mall.

Penaklukan kembali dilakukan pasukan Akbar tahun 1576 M menuju daerah Bengal. Kerajaan Bengal merupakan salah satu sisa-sisa Kesultanan Delhi yang masih bertahan di kawasan India. Bengal didirikan oleh Ilyas Khan pada tahun 1342 M. Perebutan wilayah Bengal bahwasanya sudah terjadi pada masa Sultan Nashiruddin Nasrat Shah karena mendapatkan perlawanan dari Sultan pertama Mughal yaitu Zaharuddin Babur, akan tetapi daerah Bengal masih belum dapat ditakhlukan. Pada masa Jalalludin Muhammad Akbar inilah Kerajaan Bengal berhasil ditakhlukan menggunakan kekuatan militer Mughal, akan tetapi untuk menjaga hubungan kerjasama yang baik Akbar menggunakan cara yang halus dengan tidak mendiskriminasi lawannya selain itu menggunakan strategi toleransi dalam bidang politik sehingga memepermudah hubungan aliansi Kerajaan Mughal dengan Bengal yang terjadi setelah pada tahun 1757 M. Penguasaan Bengal semakin menggugah Akbar untuk melakukan perluasan wilayah, pada tahun 1586 M pasukan Akbar mengepung daerah Kashmir dan Sind juga dapat dikuasai pada tahun 1591 M. Kashmir dan Sind merupakan wilayah yang subur dengan penakhlukan Kashmir semakin melimpah ruah keuntungan Mughal guna mensejahterakan masyarakatnya dan menyeimbangkan sistem pemerintahannya. Kerajaan Chitor yang sempat jatuh ditahun 1568 M, kembali membangkitkan basis kekuatan di bawah Maharana Pratap yaitu anak dari Udai Singh, ini merupakan gejolak perlawanan terbesar Mughal, pertempuran dapat dimenangkan ditahun 1597 M dengan dibumbui peristiwa meninggalnya Pratap Singh sedangkan Udai Singh menghembuskan nafas terakhirnya didalam pengasingan. Kematian Maharana Pratap dan Udai Singh tunduklah semua kekuasaan Rajputana ditangan Mughal, dengan begitu daerah lain mudah

dikuasai, Bangsa Rajput merupakan bangsa terkuat pada masanya, kekuatan Rajput sama dengan kekuatan Bangsa Hindustan. Chitor merupakan kerajaan Rajput yang memiliki kekuasaan tertinggi. Mughal yang berhasil menguasai Rajput ditandai dengan pendirian menara kekuasaan Mughal (lihat halaman 68) dan menandai hampir seluruh India bagian utara takhluk terhadap pemerintahan Akbar, seperti Rantapur, Kalingar, Gujarat, Lahore, Kabul dll (lihat lampiran 72) (Beveridge 1907, 47-53; Jaffar, 1936; 81-91; Hamka, 1960:148)

Keberhasilan Mughal mempertahankan kekuasaannya di India tidak terlepas dari peran Jalalludin Muhammad Akbar yang serta merta memimpin pasukan secara langsung. Militer Mughal dibawah Akbar memang sangat kuat, apalagi setelah banyaknya hubungan kerjasama regional yang dilakukan semakin memperkuat kedudukannya dan melegitimasi kekuasaannya di tanah Hindustan. Akbar merupakan pemimpin yang tegas dan keras, akan tetapi dalam menghadapi musuhnya yang ditakhlukan dengan rendah hati dan bijaksana, Jalalludin Muhammad Akbar menghentikan perbudakan ditawanan perang dan pembunuhan kepada pemimpin kerajaan yang kalah dalam peperangan, akan tetapi mengajaknya kedalam aliansi Mughal, hal itu merupakan salah satu strategi Akbar dan secara pelan-pelan Sultan telah mengambil rasa simpati dan empati masyarakat Hindustan (Yatim, 2013:149; Mubarok, 2004:211).

Penguasaan India bagian Utara menjadikan semangat Akbar semakin berkobar walaupun umurnya yang semakin senja tidak meruntuhkannya. Sultan memulai memperluas wilayahnya ke daerah Selatan, pertama kali ke daerah Deccan yang merupakan daerah terdekat dengan kekuasaan Mughal. Deccan sebagai penanda daerah terakhir penaklukan Akbar yang dilakukan pada tahun 1596 M dan berhasil dikuasai setelah setahun didalam medan peperangan pada tahun 1601 M. Kepemimpinan Akbar harus berakhir karena pemberontakan yang dilakukan Pangeran Salim yang berkeinginan segera menduduki singgasana Mughal. Abdul Fadzl harus menjadi korban dari pemberontakan sang pangeran, Abdul Fadzl merupakan *wasir* dan guru dari Sultan Jalalludin Muhammad Akbar, sang guru sangat dihormati dan dicintai Akbar karena Abdul Fadzl juga membantu dalam menstabilisasikan pemerintahan Akbar dengan nasehat-

nasehat bijaknya maupun tindakannya. Peristiwa kematian sang guru menyebabkan Sultan Akbar mendapat serangan jantung, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh dari tahun ke tahun, hingga ditahun 1605 M Jalalludin Muhammad Akbar menghembuskan nafas terakhirnya (Musidi, 2012:47).

5.1.2 Politik *Sulh-e-kul* atau Politik Toleransi

India merupakan suatu negara yang memiliki beragam agama dan budaya, dalam penyatuan dan menciptakan perdamaian dimasa pemerintahan Kerajaan Mughal maka Sultan Akbar menerapkan sebuah sistem politik yang didalamnya tidak memandang derajat semua penduduk India, semua berhak ikut serta dalam mengatur tampu pemerintahan di masanya, hal inilah yang membuat sebuah reformasi didalam aturan pemerintahan Mughal sebelumnya dibawah Zaharuddin Babur dan Nashiruddin Humayyun yang mana sistem pemerintahan yang diktator dengan kekuasaan tertinggi oleh Mughal dan diatur oleh Mughal dan daerah yang kalah adalah tawanan perang yang harus mematuhi seluruh kebijakan yang diterapkan seperti pembayaran pajak-pajak daerah yang sangat memberatkan, pemberian daerah wilayah kekuasaan daerah yang kalah dan tidak memberikan hak kepada raja di daerah tawanan perang. Penerapan Politik kakek dan ayah Sultan Akbar ini sangat berbanding terbalik, akan tetapi sistemnya inilah yang berhasil membawa Mughal ke pintu masuk ke hati masyarakat Hindustan yang membawa rasa simpati dan empati yang menyebabkan keberhasilan dalam sistem pemerintahannya (Mubarok, 2004:212). Sistem politik yang dijalankan Akbar terkenal dengan nama politik *Sulh-e-kul* atau politik toleransi, dari sistem ini masyarakat Hindu dan Islam saling berdampingan dalam membangun pemerintahan India. Politik inilah yang menjadikan perdamaian di Negeri India atas pemerintahan Mughal, politik *Sulh-e-kul* sangat baik diadaptasikan di wilayah India, hingga masa kedudukan Inggris di India menerapkan sistem yang dijalankan sang Sultan. Politik *Sulh-e-kul* merupakan sebuah sistem yang didalamnya melahirkan beberapa lembaga-lembaga.

Jalalludin Muhammad Akbar merupakan pemimpin yang sangat bertanggungjawab, Sultan Akbar mengorbankan apa yang dimilikinya untuk

melindungi rakyat dan kerajaannya, guna memperluas daerah kekuasaan tanpa memeperbanyak pertumpahkan darah perlawanan Akbar menggunakan strategi politik dengan perkawinan. Di mulai tahun 1562 M, dengan membangun sebuah hubungan kerjasama dengan kerajaan Amer (Jaipur) yaitu *Rajkumari* Jodha (Putri Jodha) yang merupakan anak dari Raja Birbal, Jodha kemudian diberi gelar Jodha *Begum* atau Ratu Jodha. Jodha *Bai* juga memeiliki gelar *Mariam-Uz-zamani* yang merupakan gelar yang diberikan kepada seorang wanita yang melahirkan anak pertama keturunan Raja dan menjadikannya sebagai penerus dari tahta kerajaan yaitu Pangeran Salim. Pernikahan aliansi pertama ini membawa perubahan besar bagi sikap Akbar, perbedaan yang dianut menjadikan sikap Akbar yang semakin toleransi, dari dimulainya dibangunnya kuil di Istana Mughal hingga perayaan hari-hari besar umat Hindu. Terjalannya hubungan perkawinan, Baghwan Das putra Birbal dan Cucunya Man Singh (lihat halaman 65) diangkat menjadi bangsawan kesultanan Mughal dan menempatkannya pada basis militer Mughal, hal ini memberikan dampak baik bagi Akbar dan Mughal selain terjalinya hubungan kekeluargaan. Mughal semakin kuat dengan mendapatkan bantuan dari kerajaan Amer (Musidi, 2012:46)

Bangsa Rajput memiliki kasta Ksatria, hal ini menguntungkan Mughal untuk mendapatkan bantuan dalam hal pertahanan. Setelah menikahi putri dari Bihari Mall, setiap bangsa Rajput yang ditakhlukan maka raja tersebut akan menikahkan putrinya dengan para bangsawan Mughal maupun sang Sultan, antara lain kerajaan yang memiliki hubungan politik dengan Mughal adalah Rathambor, Marwar, Bikamer dan Jasselmir yang dilaksanakan pada tahun 1569 M, kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan berkasta ksatria yang membantu dalam pertahanan militer kekuatan Mughal.

Tahun 1561 M sebelum aliansi dengan bangsa Rajput Akbar juga melakukan pernikahan dengan Salima Sultana yang merupakan mantan istri dari perdana menteri Bairam Khan, Salima juga merupakan anak dari Gulrang Begum yang merupakan anak dari Zaharuddin Babur, Akbar dan Salima merupakan saudara persepupuan. Salima *Begum* adalah wanita yang memiliki kedudukan tertinggi di *Harem* (istana ratu) dan memiliki pengaruh politik utama di

pengadilan utama dan kekaisaran Mughal. Pernikahan yang dilakukukan Akbar digunakan untuk memantau keadaan politik istana Mughal dan informasi diperoleh dari Salima *Begum*. Hubungan kerjasama yang dilakukan Akbar memiliki tujuan masing-masing yang diperuntungkan pada kemaslahatan Kerajaan Mughaldan pengakuan kedaulatan Raja yaitu raja Mughal menaungi kerajaan-kerajaan di India.

Berkembangnya wilayah kekuasaan dan dukukungan terhadap pemerintahan Mughal. Memperlancar pengaruhnya kekuasaanya di Negara Hindustan, Sultan Akbar memulai pembentukan suatu sistem pemerintahan yang bertumpu pada politik *Sulh-e-kuhl*. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan militeristik yaitu pemerintahan pusat (sentralisasi) yang dipimpin secara langsung oleh Sultan, Meluasnya wilayah kekuasaan Kerajaan, untuk mempermudah mengawasi pemerintahan daerah kekuasaan Sultan Akbar diluar sentral Kerajaan. Akbar membagi pemerintah daerah yang dipegang oleh *Sipah Salar* (kepala komandan), sedang subdistrik dipegang oleh *Faudjar* (komandan), pejabat sipil diberi jabatan kemiliteran dan diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Keberhasilan Mughal memang tidak terlepas dari kekuatan militernya, dalam pemerintahannya Akbar menerapkan sistem *mansabdari* (balas jasa kedudukan). Diketahui bahwa setiap orang yang memiliki kedudukan di kerajaan Mughal maka harus mengikuti pelatihan militer baik itu dari keturunan Mughal ataupun kerajaan dibawah aliansi Mughal. Jalannya sistem ini menerapkan setiap orang yang memiliki *mansab* di Mughal maka akan diberikan beberapa prajurit untuk dilatihnya, semata-mata hal ini untuk menambah jumlah pasukan militer Mughal dan memberikan ketrampilan dan kekuatan yang lebih baik dari sebelumnya, jumlah pasukan disesuaikan dengan jabatannya dan ditentukan langsung oleh Sultan Akbar atas rekomendasi dari para pimpinan militer, gubernur propinsi dan pejabat istana dan. Berikut pembagian jumlah pasukan pelatihan militer Mughal:

Tabel 5.1 Pembagian Tentara Militer Kerajaan Mughal Menurut Kedudukan (Mansab)

No	Kedudukan (<i>Mansab</i>)	Kelas	Pasukan Militer	
1.	Bangsawan Utama (<i>amirs</i>)		10000 pasukan	
2.	Pangeran Sedarah	Kelas 1	10000 pasukan	
3.	Kepala Bagian (<i>Sipah Salar dan Faudjar</i>)	}	5000 pasukan	
4.	Bangsawan (<i>amirs</i>)		Kelas 2	5000 pasukan
5.	Pangeran		5000 pasukan	
6.	Pejabat Daerah	Kelas 3	400 pasukan	

Sumber: Musidi (2012:48).

Tabel 5.2 Tabel Gaji Pertahun Mansabdari Berdasarkan Tingkatan Kelas

<i>Comman-der of</i>	<i>Horses</i>	<i>Elephants</i>	<i>Beasts of burden and carts, with strings of mules</i>	<i>Selary, monthly (in rupees)</i>		
				<i>1st grade</i>	<i>2nd grade</i>	<i>3rd grade</i>
5000	340	100	260	30000	29000	28000
1000	94	31	67	8200	8100	8000
500	30	12	27	2500	2300	2100
100	10	3	7	700	600	500
10	4	-	-	100	82,5	75

Sumber: Smith (1917:363)

Tabel 5.1 memaparkan pembagian kelas dalam menggempur politik Mughal, sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki kedudukan tinggi di Mughal akan diberikan pasukan militer. Dimana pembagian pasukan militer dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan kedudukan atau jabatannya, semakin tinggi jabatan maka pemberian perlengkapan persenjataan perang dan pasukan perang semakin banyak karena semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin ahli pula ketrampilan berperangnya, yang mana komando perang dipilih oleh Sultan langsung dengan melihat ketrampilan dan prestasinya dalam medan peperangan, sedangkan orang yang memiliki jabatan lebih rendah diberikan pula pasukan lebih sedikit. Pada tingkatan pertama terdapat bangsawan utama dan

pangeran sedarah yang diberikan sejumlah 10.000 pasukan, bangsawan utama adalah orang yang memiliki darah keturunan dari sultan, sedangkan pangeran dalam kelas ini merupakan pangeran dari anak keturunan sultan. Tingkatan atau kelas kedua terdapat kepala bagian dan pangeran yang bukan dari keturunan langsung sultan dan aliansi Mughal, kelas ini diberikan sebanyak 5000 pasukan. Tingkatan ketiga adalah pejabat sipil yang diberikan 400 pasukan militer.

Pada tabel 5.2 menjelaskan secara detail upah yang diberikan pada sistem *mansab*. Pemberian gaji berdasarkan kedudukan yang diberikan kepada komandan pasukan. Kedudukan komandan kelas teratas akan diberikan pasukan militer yang banyak dengan penyesuaian gaji yang tinggi sedangkan kelas bawah pasukannya lebih sedikit dengan gaji yang lebih sedikit dibanding komando kelas atas yaitu para bangsawan dan kepala bagian. Pada setiap kedudukan dibagi menjadi tiga kelas yaitu pemimpin pasukan kelas terampil, sedang, dan pemula yang akan menentukan pemberian gaji pada setiap jabatan yang diberikan. Diketahui bahwa seorang komandan kelas atas diberikan pasukan sebesar 5000 pasukan, 340 ekor kuda, 100 gajah, dan 260 angkatan persenjataan, kelas pertama mendapatkan gaji sebesar 30000 rupee, kelas kedua 29000, dan kelas ketiga sebesar 8000 rupee, seperti halnya tabel diatas bisa dilihat pembagian pasukan dan upah yang diberikan kepada setiap kelas. Penerapan sistem ini juga menghasilkan hubungan timbal balik terhadap Kesultanan, yang mana setiap komandan harus membayarkan pajak terhadap fasilitas yang diberikan seperti kuda, gajah, dan persenjataan perang.

Mansabdari sendiri memiliki pasukan cadangan (bawahan) yang dinamakan *Dakhilis*, selain itu Akbar juga membentuk pasukan militer dari para pemuda-pemuda dari keluarga Mughal yang diberi gelar *Ahadis*, para pemuda ini nantinya dapat meningkatkan gelar mereka sebagai *Mansabdari* setelah menunjukkan ketrampilannya atau prestasinya dalam bidang militeristik. Menurut pembagiannya tentara-tentara bersenjata Mughal tersebut akan dibagi menjadi empat bagian yaitu: (1) kavaleri; (2) infanteri; (3) artileri dan; (4) angkatan laut. Kontribusi terbesar selama pemerintahan Akbar adalah pasukan kavaleri, pasukan ini adalah pasukan berkuda tangguh dan kuat yang berhasil menakhlukan

kekuasaan lawannya, adapun yang kurang mendapat perhatian dari pemerintahan adalah pasukan angkatan laut. Pasukan ini digunakan hanya untuk mengawal perdagangan dengan negara lain, hal ini dikarenakan sangat minimnya kerajaan Mughal melakukan pertempuran jalur laut, pertempuran di lautan sendiri mulai terjadi di akhir pemerintahan Akbar yang dimulai kedatangan bangsa Barat yaitu Inggris dan Portugal. Pembiayaan pasukan tentara selama setahun rata-rata terhitung menghabiskan 2 milyar rupee atau 100 juta pound (Sokah, 1994:47-48)

5.1.2.1 Pemerintahan Propinsi

Pemerintahan propvinsi sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan daerah, yang mana setelah melakukan perluasan wilayah daerah Mughal semakin meluas. Wilayah Kesultanan Mughal terbagi atas 15 Propinsi Agra, Allahabad, Qudh, Delhi, Lahore, Multan, Kabul, Amer, Benggala, Bihar, Ahmadabad, Malwa, Berar, Khandesh dan Ahmadnagar. Pemerintahan Mughal menjalankan sistem sentralisasi atau pemerintahan pusat yang berada di Delhi yang beribu kota Agra, kawasan wilayah atau daerah yang berada jauh dari jangkauan Sultan Akbar dipimpin oleh seorang gubernur atau *Sipah Sallar* dan *Nazim* adalah pengganti gubernur. *Nazim* menjabat sebagai kepala pemerintahan sipil dan militer pada tiap-tiap daerah. Gubernur dan *Nazim* memiliki anggota bawahan antara lain *Diwan* (menteri-menteri yang mengurus pemerintahan daerah) yang bertugas mengatur sistem keuangan, politik-hukum dan sosial, *Faudjar* (komandan) bertugas menjaga keamanan kekuasaan daerah distrik dari pembelotan dari dalam maupun serangan dari luar, bahwasanya *Faudjar* adalah pemimpin angkatan militer dan *Sadr* (lembaga kehakiman) yang memiliki wewenang menjaga kestabilisasian setiap daerah agar tidak tumbuh rasa ingin berkuasa atau mendirikan kekuasaan mandiri (Imri, 2014:224).

Kepemerintahan Mughal tidak memiliki undang-undang tertulis secara mutlak. Lembaga *As- Sadr* juga memiliki tugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian urusan kriminalitas dan penentuan dalam tindakan kejahatan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan agamanya, orang Islam akan dihukum secara Islam sedangkan orang Hindu akan dihukum secara adat Hindu. Proses dari

penyelesaian permasalahan kriminalitas dimulai dari individu dan individu yang dirugikan atau pelaku dan korban, proses ini menentukan permasalahan akan diselesaikan sendiri atau hakim, penanganan ini dilaksanakan oleh pengaduan lembaga kejahatan yang terkenal dengan *diwan-i-mazalim* atau pengadilan pengaduan. Hukuman dalam Islam Mughal disesuaikan dengan kesultanan yang berada di Timur Tengah, seperti halnya hukuman membunuh bagi tersangka yang melakukan biasanya tidak dimasukkan kedalam penjara akan tetapi menggunakan hukuman cambuk, selain itu permasalahan juga dapat diselesaikan oleh keputusan raja dan dianggap mutlak. Pembagian struktur pemerintahan di kawasan provinsi atau distrik mempermudah pengawasan setiap perkembangan wilayahnya

Pemerintahan Mughal dipegang langsung oleh Sultan Akbar dengan sistem pemerintahan pusat, akan tetapi banyaknya kawasan wilayah Kerajaan Mughal hingga tumbuhnya pemerintahan provinsi guna membantu mestabilisasikan politik dan mencegah terjadinya konflik politik dibentuklah sistem tata negara atau *wasir* atau *Diwan*. *Diwan* yang mengurus administrasi pemerintahan adalah *Diwan* keuangan atau menteri keuangan yang dibentuk langsung oleh Sultan Jalalludin Muhammad Akbar. *Diwan* ini bertugas mengatur keuangan negara baik pengeluaran yang digunakan dalam bidang militer, pembendaharaan istana (pengeluaran dan pemasukan uang kerajaan) dan sistem perpajakan. Selain menjabat sebagai *Diwan* ini memiliki posisi tertinggi di istana karena memiliki jabatan lain yakni “wakil” atau perdana menteri. Pengurusan terhadap uang negara membagi *Diwan* ini menjadi dua yakni *Diwan Taujih* (*Diwan* keuangan militer) dan bendahara negara, walaupun terbagi menjadidua tetap dinaungi satu *Diwan*. Urusan administrasi keuangan Akbar mengangkat seorang Hindu yang memiliki kinerja yang ulet pada masanya yaitu Todar Mall yang didapatkan Akbar setelah penakhlukan Gujarat, Todar Mall adalah orang kepercayaan Akbar setelah Bhairam Khan dan Abu Fadzl. Kinerja *Diwan* keuangan mendapat sumbangsih tenaga kerja di bidang perpajakan dari Khwaja Mansur yang menjabat sebagai *diwan-i-tan* yang memiliki tugas menarik pajak daerah kerajaan Mughal dan Mir Fathulla Shirazi menjabat sebagai *diwan-i-khalsa* yang memiliki tanggung jawab sebagai asisten *diwan-i-tan* yang mencatat

data dari data penarikan pajak dan pengeluaran hasil pajak daerah (Sokah 1994:43 Musidi, 2012:48).

Pendapatan Imperium Mughal terbagi atas dua bagian yaitu pendapatan pusat atau imperial dan lokal atau provinsi. Pendapatan imperial didapatkan dari penarikan pajak rakyat yaitu pajak tanah dan pajak dagang, pendapatan tanah atau sistem sewa tanah yang diterapkan petani kaya kepada petani kecil, harta rampasan perang, monopoli perdagangan dan pajak kepala yang diberatkan kepada petinggi-petinggi Mughal yang bekerja dibagian pusta ibu kota (Agra di Delhi). Sedangkan pajak propinsi diperoleh dari penetapan hasil tanah yang diberikan kepada gubernur dan para pegawainya, pajak transit (pajak persinggahan atau berwisata), denda-denda, hadiah-hadiah dari rakyat dan dari transportasi.

5.2 Kebijakan di Bidang Sosial-Ekonomi

Pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar selain sukses dalam bidang politik, agama, dan seni, keberhasilannya juga dapat dirasakan di bidang sosial-ekonomi. Banyak usaha yang dilakukan di bidang sosial-ekonomi supaya berjalan dengan lancar, adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat mempermudah kemajuan tersebut. Usaha-usaha di bidang sosial-ekonomi itu antara lain:

5.2.1 Bidang Pertanian dan Perdagangan

Sistem perekonomian mughal bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. komunikasi antara petani diatur pemerintah dengan cara yang baik. dimana para petani yang memiliki lahan kecil atau *deh*, para *deh* ini membentuk sebuah komunitas yang tergabung dalam *pargana* (desa) dan dipimpin oleh seorang *Mukaddam*. Melalui para *mukaddam* inilah para petani kecil berhubungan dengan pemerintah. Dimasa Akbar pertanian Mughal terbilang maju, penjualan terbesar pada sektor pertanian adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah, rempah, tembakau, kapas, nila dan bahan-bahan celupan, untuk setiap hasil panen sepertiga hasilnya wajib diberikan kepada kerajaan. Selain maju dalam hasil buminya, Kerajaan Mughal juga mengembangkan pada penjualan

pakaian tenun, kain tipis yang terbuat dari gordyn yang mana bahan ini banyak dihasilkan di Gujarat dan Bengal (Yatim, 2013:150). Perkembangan perekonomian Mughal dapat mencapai perdagangan ekspor yang mana hasil pertanian dan kerajinan seperti pembuatan gordyn dikirim ke berbagai wilayah Eropa, Afrika, Afrika dan Asia Tenggara. Hubungan kerjasama dengan negara lain menguntungkan bagi pemerintahan Mughal barang dijual dengan harga mahal dengan keuntungan yang besar. Hasil pangan Mughal dalam pemerintahan rata-rata mengalami tingkatan yang normal hal ini dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 5.3. Daftar Jumlah Ketersediaan dan Harga Makanan Kesultanan Mughal di Tahun 1600 M

Keterangan bahan makanan	Harga per "mound", 55,5 lb, dalam perhitungan 1 dams sebesar 40 rupee	Upah yang diperoleh	
		Tenaga kerja buruh (rendah) berpenghasilan 2 dams atau 1/20 rupee	Tenaga kerja terampil memiliki upah sekitar 7 dams atau 7/40 rupee
		Lb (pon)	Lb (pon)
Gandum	194 lb. per rupee = 40 dams	9,7	34
Selai	277 lb. per rupee	13,85	48
Beras kualitas baik	$20\frac{3}{4}$ lb. Per rupee	1	3,5
Beras biasa	111 lb. Per rupee	55,5	19,4
<i>Mung pulse</i> (kedelai hijau)	37 lb. Per rupee	1,85	6,4
<i>Mash pulse</i> (kedelai hitam)	$138\frac{3}{4}$ lb. Per rupee	6,9	24,15
<i>Moth pulse</i> (kedelaimerah)	$194\frac{1}{4}$ lb. Per rupee	9,7	33
Ayam	134 lb. Per rupee	6,7	23,45
<i>Juwar Millet</i>	222 lb . Per rupee	11,1	38

Gula Putih	17 lb. Per rupee	0	2,9
Coklat	39 lb. Per rupee	19,5	6,8
Mentega	13 lb. Per rupee	0,65	2,2
Minyak sesamun	27 lb. Per rupee	1,35	4,7
Garam	138 lb. Per rupee	6,9	24,15

Sumber: Smith, 1917:390

Penunjukan tahun angka 1600 M yang mana pemerintahan Akbar telah berhasil melumpuhkan seluruh kawasan India bagian Utara, dan menerapkan harga pangan diseluruh kawasan wilayah berdasarkan dari hasil pendapatan masyarakat. Pemaparan tabel diatas dapat dianalisis bahwa upah pekerja yang diberikan pada Kesultanan Mughal berdasarkan jabatannya, orang yang memiliki pekerjaan kasar seperti buruh berpenghasilan sekitar 2 *dams* atau sebesar 200 *rupee* dari $\frac{1}{20} \times 100 = 5$, kemudian $5 \times 40 = 200$, sedangkan orang yang memiliki pekerjaan dengan ketrampilan tinggi seperti bangsawan atau pemerintahan berpenghasilan sekitar 7 *dams* atau sebesar 700 *rupee* dari $\frac{7}{40} \times 100 = 17,5$, kemudian $17,5 \times 40 = 700$, gaji pokok masyarakat Mughal terbilang sedang akan tetapi gaji pokok tersebut ditambahkan dengan keikutsertaan masyarakat di dalam kemiliteran Mughal dengan gaji pokok dibagi berdasarkan *mansab* dengan pendapatan perbulan dengan angka terbesar 30000 *rupee* (hanya untuk keluarga kerajaan) hingga angka terkecil 100 *rupee*, selain memberikan gaji pokok besar hal ini semata-mata untuk memperkuat basis militer di masyarakat luas karena Mughal merupakan kerajaan yang didominasi dengan ketangguhan militernya. Dalam hitungan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan tenaga buruh dapat membeli gandum sebesar 9,7lb sedangkan tenaga terampil dapat memenuhi kebutuhan gandumnya sebesar 34lb, berikut perhitungan perolehannya: $\frac{1}{20} \times 194 = 9,7$, sedangkan pekerja terampil $\frac{7}{40} \times 194 = 34lb$.

5.2.2 *Diwan* Perpajakan

Dana pemasukan antuan ekonomi Kerajaan Mughal terbesar sebagian besar dari hasil pajak yang diterapkan, sistem pajak diterapkan guna membantu dana pertumbuhan perekonomian, selain itu jika terjadi suatu krisis ekonomi di negara Hindustan Kerajaan sudah memiliki solusi cadangan yang diberikan kepada rakyat dari hasil pajak yang berupa barang produksi maupun uang. Penerapan kebijakan Pajak Sultan Akbar semata-mata untuk kepentingan rakyat dan kemajuan Kerajaan Islam Mughal di mata dunia. Dijelaskan pada bab pembahasan sebelumnya perpajakan Mughal ditangani oleh Khwaja Mansur (*diwan-i-tan*) dan Mir Fathulla Shirazi (*diwan-i-khalsa*) yang merupakan suatu struktur jabatan menagani sistem keuangan atau administrasi dibawah menteri keuangan Mughal, penjabatan Menteri Keuangan Mughal diduduki oleh seorang Hindu yang bijak yaitu Todar mall. *Diwan-i-tan* bertugas sebagai pemungut dan mengontrol pajak daerah Mughal sedangkan *diwan-i-khalsa* bertugas sebagai asisten dari *diwan-i-tan* yang mencatat segala pengeluaran dan pemasukan penggunaan pajak. Pemungutan pendapatan pajak daerah disebut dengan *raiyatwari*. Sistem pajak yang diterapkan Akbar terbagi menjadi dua bagian yaitu (1) pajak tinggi yang diberikan kepada pejabat tinggi Kerajaan Mughal, (2) Pajak rendah diberikan kepada petani. Penarikan pajak biasanya berupa pajak tanah dan pajak benda (kepemilikan barang)

Wilayah kekuasaan Akbar yang luas menjadikan Mughal memiliki pemerintahan daerah yang disebut Distrik (provinsi) dan Subdistrik (kota) yang mana dibagian distrik dipimpin oleh seorang gubernur yang dibantu seorang komando yang mengawasi bagian subdistrik yang dipilih langsung oleh Sultan Akbar, dimana daerah mughal terbagi lima belas propinsi yang mana setiap gubernur dan pegawainya atau pajak provinsi harus menyetorkan pajak kepada pemerintah pusat berupa $\frac{1}{3}$ hasil gaji dan pemberian benda-benda yang dihasilkan dari distrik dan subdistrik maupun dari harta rampasan perang. Petani hanya diberatkan pajak dengan memberikan $\frac{1}{3}$ hasil pertanian (berupa bahan pokok) (Yatim, 2013:150).

Mobilisasi pemerintahan Mughal dengan menstabilkan sistem ekonomi menjadi suatu sendi utama didalam pemerintahan, Sultan menghapuskan dua pajak yang memberatkan rakyat yaitu pajak jizyah, pajak jizyah adalah pajak beribadah hal ini tidak sesuai dengan politik toleransi yang dijalankan Akbar, selain itu pajak para petani miskin juga dihapuskan yang mana sepertiga hasil panen sudah diberikan kepada kerajaan dan sebagai gantinya pajak bagi mereka dihapuskan. Para petinggi Mughal sebenarnya sangat khawatir saat penghapusan kedua pajak ini yang mana akan mengurangi pendapatan pemerintahan dengan jumlah yang begitu besar, akan tetapi dengan bijak Akbar berani mengambil keputusan ini. Sebaliknya dengan keputusan Akbar pemerintahan banyak mendapat hadiah-hadiah dari simpati masyarakat dan menutupi kekurangan pajak tersebut, bahwasanya perekonomian terkuat mughal terletak pada sektor pertanian dan perdagangan karena Hindustan kaya akan bahan-bahan pokok yang digunakan untuk sistem Industri (Sokah, 1994: 46).

5.2.3 Penghapusan Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah suatu pembagian kelas berdasarkan kedudukannya bisa dari kasta maupun jabatan atau pekerjaan. Akbar adalah muslim yang taat dalam ajaran Islam manusia dianggap sama dimata Tuhan, baik orang yang memiliki jabatan Tinggi maupun rendah dianggap sama agar tidak terjadi diskriminasi sosial, akan tetapi Sultan Akbar tidak dapat menyentuh stratifikasi sosial dari masyarakat Hindu karena adanya ketoleransian antar umat beragama yang tidak diperbolehkan mencampuri urusan pribadi antar umat beragama kecuali adanya perselisihan diantara keduanya.

Penghapusan kelas sosial mempermudah masyarakat yang ingin bekerja pada bidang terampil yang didasarkan atas ketrampilan individu, akan tetapi dalam prosesnya tidak semua menerima baik penghapusan kelas sosial, dalam sistem perekonomian pertanian dan perindustrian masih dibutuhkan seorang buruh, jabatan didalam sistem kemiliteran yang memiliki jabatan tertinggi tetaplah kaum bangsawan sedarah dari Sultan akan tetapi masyarakat kecil diperbolehkan mengikuti kemiliteran akan tetapi pada pangkat yang rendah. Akbar sendiri juga

kesulitan menghilangkan status tersebut akan tetapi tetap dijalankan walaupun sebagian fungsinya tidak terlaksana dengan baik. Sultan hanya bertindak jika ada peristiwa diskriminasi terhadap kaum bawah karena Akbar adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab atas hak keadilan yang dimiliki oleh rakyatnya. Kebijakan lain yaitu dengan diperbolehkannya masyarakat langsung mendatangi Akbar untuk berkeluh kesah terhadap masalah yang dihadapi dan akan diberikan solusi terbaik, hal ini semakin mendekatkan diri Akbar kepada masyarakatnya.

5.3 Kebijakan di Bidang Agama Dan Seni

Akbar adalah raja terbesar dari Dinasti Mughal, dan sukses dalam segala bidang. Perhatian Sultan Akbar juga tidak luput dalam mengembangkan bidang seni Mughal, yang mana perkembangannya menimbulkan akibat akulturasi budaya Islam dan Hindu. Pengaruh dari perkembangan kebudayaan ini akan diteruskan penerus-penerusnya hingga saat ini wujud dari budaya yang dihasilkan Sultan Akbar sebagian kecil masih tertinggal dan dapat dinikmati disebagian kota di India dan Pakistan yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Mughal, beliau juga mendapatkan gelar sebagai bapak budaya di Hindustan pada masa pemerintahannya, hal ini dikarenakan cita rasa yang bagus dalam seninya. Ia adalah orang yang bijak dan berpikiran luas maka dari itu banyak karya seni atau budaya yang dihasilkan Sultan Akbar antar lain:

5.3.1 Kebijakan Bidang Agama

Islam bukanlah agama mayoritas di India, kepemimpinan kerajaan Islam tidak akan berkembang jika tidak mendapatkan sokongan dari maharaja-maharaja Hindustan. Mughal sendiri merupakan salah satu kerajaan Islam yang yang berhasil berkembang di India, penyiaran agama Islam memang sangat sukar dilakukan dinegara Hindustan tersebut beberapa cara berkembangnya Islam di India antara lain dengan beberapa faktor antara lain: (1) toleransi, senjata ini adalah yang paling ampuh dalam penyiaran agama Islam baik di India maupun daerah lain yang ditakhlukan Islam; (2) Kebudayaan dan kesenian, sebagaimana kita ketahui kesenian dan kebudayaan Hindu sangat ditekankan sekali, dengan

melalui jalan ini sedikit-demi sedikit budaya Islam dapat dilihat dan mulai dipelajari oleh masyarakat India yang tertarik; (3) persamaan hak, Hindu merupakan agama yang mengenal kasta. Perbedaan kasta inilah yang menjadikan mereka memeluk agama Islam (Almuhdar, 1983:155).

Berkembangnya agama Islam tidak terlepas dari peran sang sultan Mughal ke tiga yaitu Jalalludin Muhammad Akbar, akan tetapi untuk kepentingan politik dan mencegah adanya perselisihan dalam umat beragama Akbar mengeluarkan undang-undang yang telah dirangkainya melalui permusyawaratan dengan pemuka agama Islam, Hindu, Budha, dan Nasrani. Lahirnya undang-undang tersebut mulai timbul dipikiran Akbar sejak tahun 1582 M yang didasari pemikiran dalam kebebasan beragama, hal ini juga adanya pengaruh dari Alaudin Khilji (Smith, 1917:209). Hasil undang-undang tersebut tertuang dalam *Din Illahi* (agama Allah). Akbar percaya bahwa semua umat beragama beribadah kepada tujuan yang sama yaitu Tuhan (kepada Tuhan yang sama atau Monotheisme), kebijakan ini adalah salah satu bentuk ketoleransian Akbar terhadap agama lain. Adapun isi dari UU *Din Illahi* menurut Almuhdar (1983:158-159) antara lain:

- 1) menghapuskan pungutan pajak atau jizyah yang diwajibkan oleh para Sultan Islam sebelumnya kepada umat Hindu. Jizyah yang dihapuskan adalah pembayaran jizyah beribadah bagi umat Hindu, Akbar sendiri beranggapan bahwa jika seseorang ingin melakukan Ibadah maka tidak perlu mengeluarkan biaya karena setiap orang baik kaya maupun miskin berhak datang dan menyembah kepada Tuhannya;
- 2) mengizinkan kepada semua penganut agama untuk membangun tempat ibadatnya sekehendaknya. Penerapan politik ini baru diterapkan Akbar dan tidak pernah dijalankan oleh Sultan sebelumnya. Dengan politik ini maka Hindu, Budha, Nasrani dan golongan lain menggunakan kesempatan ini untuk mendirikan kuil-kuil dan gereja sebanyak mungkin;
- 3) diizinkan bagi orang yang baru masuk Islam untuk keluar dan kembali pada kepercayaan lamanya. Sultan Akbar berasumsi bahwa semua

manusia memiliki hak asasi untuk memilih agamanya masing-masing, hal ini Akbar pelajari dari ibunya yaitu Ratu Hamida Bano;

- 4) umat Islam dilarang untuk menyembelih sapi. Sapi merupakan simbol binatang suci bagi umat Hindu, dapat diketahui bahwa sapi merupakan binatang yang ditunggangi oleh salah. selain itu kaum Muslimin juga dilarang menyembelih binatang di hari raya umat Hindu;
- 5) diizinkan perkawinan bagi pria Muslim dengan wanita Hindu ataupun sebaliknya. Bertolak balik dengan ajaran Islam yang melarang umatnya untuk kawin dengan orang musyrik/musyrikah, ini disebabkan adanya unsur kepentingan politik Akbar dalam infansi kekuasaan Mughal di India dengan jalur perkawinan;
- 6) seluruh penganut agama dapat melepaskan agama lamanya dan menganut kepercayaan yang telah disatukan beliau (*Din Illahi*).

Menurut Smith (1917:215) Keputusan Jalalludin Akbar dalam melahirkan *Din Illahi* menyebabkan banyak orang yang beranggapan bahwa dia adalah orang yang menyimpang dari ajaran agama akan tetapi tujuan Akbar membuat *Din Illahi* semata-mata untuk mencapai persatuan dan kedamaian masyarakatnya. Agama raja Akbar sendiri dipengaruhi oleh bermacam-macam pengaruh terhadap raja. Ibunya memberikan arahan pembelajaran terhadap budi pekerti Akbar supaya bersifat toleransi dan adil terhadap semua agama dan masyarakatnya, sedangkan dari bapaknya mendapatkan ajaran Islam aliran Syi'ah, istrinya yaitu putri dari raja Birbal juga mempunyai peranan penting dalam pemikirannya, karena istrinya beragama Hindu asli, inilah yang pada akhirnya juga merupakan salah satu faktor pemikiran Akbar menciptakan *Din Illahi* (ajaran yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa), tetapi pemikiran Akbar tentang agama dan peraturan yang sangat berbeda ini akan membawa perubahan besar di India (Erwin, 1990:39).

Agama pada pemerintahan di India adalah suatu hal yang mencolok, perbedaan berbagai macam agama inilah yang mengakibatkan tumbuhnya agama baru di India, *Din Illahi* pada awalnya adalah undang-undang yang dibuat oleh Sultan Akbar sebagai pemersatu masyarakat di India dengan maksud bahwa

masyarakat melakukan berbagai macam ritual keagamaan yang berbeda tetap saja mereka mengirimmkan kepada Tuhan yang sama. Akbar sendiri juga tidak mengekang masyarakatnya memeluk agama yang Akbar anut atau kepercayaannya sendiri. Lambat laun paham dari *Din Illahi* berkembang, dan ada sebagian orang yang menganutnya sebagai sebuah ajaran agama yang berkembang dikalangan istana sebesar 18 orang, sedangkan dikalangan masyarakat percampuran antara Hindu dan Islam menciptakan sebuah ajaran baru yaitu *Sikh* yang didirikan oleh Guru Nanak, *Sikh* sendiri terlahir dari pembelotan dari *Din Illahi* (Yatim, 201:160-161). Agama *Sikh* sendiri hingga saat ini masih berkembang di India khususnya tersebar di daerah Punjab.

5.3.2 Kebijakan Bidang Seni

Kesenian adalah suatu hal penting didalam suatu bangsa, dengan adanya seni budaya mempertandakan simbol identitas dari setiap negara ataupun Kerajaan. Kesenian Kerajaan Mughal berkembang di Tahun 1556 M -1605 M. Bangsa Mughal adalah suatu bangsa yang tidak memiliki identitas budaya bangsa atau *local genius*, Mughal mengadopsi budaya dari daerah penguasaan untuk dijadikan kesenian Mughal, akan tetapi dipemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar menumbuhkan kebijakan baru pada bidang seni. Sultan Akbar menghasilkan dan mengembangkan budaya kesenian yang menjadi ciri khas dari kesenian Mughal dengan adanya proses akulturasi dan asimilasi dari kebudayaan Persia dan India. Persia merupakan negara berkembangya eksistensi kekuasaan Mughal pertama kali. Pengembangan kesenian budaya yang diterapkan Akbar antara lain bahasa, lukisan dengan adanya sekolah menggambar, dan seni bangunan atau arsitektur.

5.3.2.1 Bahasa

Hindustan memang tidak asing lagi jika dikatakan sebagai negara dengan berbagai macam budaya, salah satunya adalah dari segi bahasa. Pada pemerintahan Mughal tahun 1456-1605 M dibawah kepemimpinan Akbar. Pada masa pemerintahan awal bahasa yang digunakan di India ada tiga macam yaitu

bahasa Arab digunakan sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa kaum bangsawan, dan bahasa Persia yang digunakan sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Sebelum Akbar menciptakan bahasa nasional untuk negara Hindustan bahasa Persia dianggap sebagai bahasa yang Indah karena digunakan para punggawa-punggawa kerajaan untuk menciptakan Syair, buku-buku dan musik. Salah satu syair terkenal dimasa itu adalah Padmavat karya Malik Muhammad Jayazi, dimana karya ini mengandung untaian pesan terhadap ketenangan jiwa manusia. Abu Fazl yang menuliskan buku dengan judul *Akbar Namah* dan *Aini Akbari*, kedua karya ini mengisahkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figure pemimpinnya (Hamka,1960:152; Musidi, 2012:49; Yatim, 2013:151).

Akbar yang memiliki pemikiran luas pada akhirnya menciptakan sebuah bahasa baru untuk mempermudah dialek antar daerah aliansi kerajaan Mughal dan tidak membedakan penggunaan bahasa melalui kelas sosial yaitu kalangan atas dan kalangan bawah. Bahasa ini merupakan gabungan dari tiga bahasa dan ditambah dengan bahasa Hindu, terciptalah bahasa Urdhu. Urdhu sendiri memiliki arti serdadu (Musidi, 2012:49). Secara cepat setelah adanya perintah raja penggunaan bahasa Urdhu digunakan di hampir seluruh wilayah India di tahun 1556 M- 1605 M. Kebijakan penggunaan Bahasa Urdhu memperkaya khazanah kesenian Mughal dengan adanya penulisan karya sastra dengan menggunakan bahasa Urdhu yang menjadi simbol identitas budaya Mughal.

Dilihat letak geografis wilayah mughal dewasa ini terbentang antara Negara India dan Pakistan, tak dapat dipungkiri bahwa kedua negara ini memiliki kebudayaan yang hampir sama akan tetapi memiliki perbedaan agama. Dewasa ini bahasa Urdhu masih dapat kita pelajari, hal ini dikarenakan penggunaan bahasa tersebut masih digunakan hingga saat ini, dari hasil wawancara secara respondensi, masih ditemukan sisa-sisa keturunan Mughal di daerah Pakistan yang berbatasan dengan daerah India yaitu Kashmir, wilayah Kashmir saat ini terbagi di dua negara yaitu India dan Pakistan. Jika dilihat pembahasan sebelumnya Kashmir merupakan salah satu daerah yang berhasil dikuasai Mughal pada tahun 1586 M, bahasa nasional yang digunakan Kashmir saat ini adalah bahasa Urdhu, dari ini dapat menjadi sebuah bukti bahwa kebenaran dari adanya

bahasa Urdu yang diciptakan Sultan Akbar memang ada kebenarannya, daerah di Kashmir yang menggunakan bahasa ini di Provinsi Bagh, Azad Kashmir (sumber: wawancara dengan Rashid latif, selaku mahasiswa di *Swedish Institute of Technology Bagh* pada 20 Mei 2017).

5.3.2.2 Sekolah Menggambar (*Mughal School of Painting*)

Kepedulian Sultan Akbar terhadap seni menggambar didasari pada anugerah yang dimilikinya, Akbar merupakan seseorang yang memiliki kegeniusan dalam seni menggambar dalam memadupadankan goresan tinta hingga memiliki suatu estetika. Kepiawaiannya didapatkan dari gurunya yaitu Abu Fazl (lihat halaman 66). Ketertarikan Akbar terhadap seni gambar menjadikannya membuka galeri seni Persia, dalam perayaan pembukaan galeri tersebut pemikiran Akbar berkembang sebuah gagasan untuk mengasah ketrampilan penduduk pribumi guna menciptakan seni asli India Mughal sebagai karakteristik dari Kesultanan, pemikiran tersebut akhirnya melahirkan sebuah sekolah menggambar di Agra yang didirikan sekitar tahun 1562 M (Jaffar, 1936:172).

Mughal sendiri sebenarnya tidak memiliki gaya seni tersendiri mereka mengadopsi dari daerah yang ditempatinya, dengan dibukannya *Mughal School of Painting* menambah identitas baru Mughal melalui hasil karya seninya. Rangka mensukseskan sekolah ini Akbar tidak segan-segan memberi bonus dan kenaikan gaji yang seimbang terhadap lukisannya. Para pelukis dirakit sedemikian mungkin agar dapat menghasilkan sebuah karya yang Indah melalui galeri seninya, dari galeri tersebut mereka dapat belajar tentang kemegahan sebuah karya yang pernah dimiliki pada zaman dahulu dan Akbar ingin mengembalikan keindahan tersebut. Usaha Akbar dalam membuka sekolah ini bukanlah hal yang sia-sia semata, para seniman berhasil menggoreskan tinta keindahan mereka terhadap menara Fathpur Sikri, banyak dari mereka yang tengah berhasil membuat karya lukis yang India pelopor pertama dengan karyanya adalah Sayyad Ali Hamzah dengan gambar *Dastan-i-Amir* Hamzah, itu merupakan goresan tinta pertama yang menggambarkan seorang tokoh figure. Karya lain adalah milik Barwan, Kwajah

Abdul Saman dan Kesu. Lukisan-lukisan tersebut diberikan perlindungan oleh Kesultanan (Jaffar, 1936:173). *Mughal School of Painting* sendiri diperkirakan berhasil mencetak tiga puluh seniman yang handal, hingga sebagian karya-karya mereka tersimpan rapi di beberapa museum dunia antara lain Britania museum terdapat sebuah lukisan dan museum terapan di Wina

5.3.2.3 Seni Bangunan (*Arsitecture*)

Pada masa Akbar merupakan masa kebangkitan Mughal kembali di India setelah kematian Humayyun. Di pemerintahan Sultan Akbar dapat dikatakan sebagai masa kejayaan Mughal, maka tak dipungkiri pada masa ini banyak dibangun bangunan Mughal yang megah. Ciri khas bangunan pada masa Akbar adalah adanya perpaduan dari dua segi budaya yaitu Islam dan Hindu. Beberapa bangunan yang dihasilkan Akbar antara lain: (1) Istana Fatehpur Sikri, istana ini dibangun atas dasar keinginan Akbar membangun ibukota baru di daerah Sikri; (2) *Red Fort* (benteng merah) di Agra, sebuah kerajaan besar pasti memiliki sebuah benteng yang megah dan besar untuk melindungi kerajaannya dari serangan lawannya. Benteng ini sangatlah besar dan megah dan didalamnya terdapat beberapa Istana dan Vila, pembangunan benteng ini berlanjut hingga penerus-penerusnya; (3) Masjid, Mughal adalah sebuah kerajaan yang bercorak Islam tak dipungkiri dibangunnya masjid-masjid megah pada masa itu yang digunakan tempat beribadah bagi masyarakat muslim. Bangunan-bangunan ini dibangun berdasarkan unsur seni Persia yang mewakili Islam dan India (Hindu) (lihat halaman 69), hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri bentuk bangunan tersebut (Yatim, 2013:151).

Dewasa ini bangunan-bangunan tersebut adalah bukti dari kebesaran Kekhalifaan Mughal, bangunan tersebut masih dapat kita nikmati hingga saat ini, menurut wawancara dengan Celia de Fatima Sardinha Crispim pada 31 Mei 2017 selaku Pengajar di University of Addis Ababa yang berkunjung ke *Jaipur dan Delhi (Agra)* di bulan Januari tahun 2008. Bangunan peninggalan Akbar adalah bangunan yang sebagian besar menggunakan bata merah (lihat halaman 67). Berdasarkan fungsinya sekarang ini sebatas digunakan sebagai tujuan wisata

edukasi, yang mana fungsinya selain menikmati keindahan yang disajikan dari bangunan peninggalan juga berfungsi menambah wawasan tentang kejayaan pemerintahan Kerajaan Mughal di India.



BAB 6. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JALALLUDIN MUHAMMAD AKBAR DI INDIA TAHUN 1556-1605 M

Pemerintahan merupakan sebuah wadah organisasi orang-orang yang memiliki kekuasaan terhadap suatu lembaga yang mengurus urusan kenegaraan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat dan negaranya. Sebuah pemerintahan memiliki kepala negara yang mengatur sistem yang berlaku, berhak mengambil dan memutuskan kebijakan yang akan diterapkan. Sama halnya dengan pemerintahan dimasa sekarang, pada masa Kesultanan Mughal di dalam pemerintahan terdapat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang Sultan atau kepala negara

Pada masa Sultan Jalalludin Muhammad Akbar kebijakan yang diterapkan didalam pemerintahannya sebagian besar menuai keberhasilan, rata-rata kebijakan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat walaupun ada beberapa yang menyebabkan dinamika di dalam roda pemerintahannya. Kepemerintahan Akbar dapat dikatakan zaman keemasan Mughal dan berhasil membawanya ke puncak kesuksesan. Berikut beberapa dampak dari kebijakan pemerintahan pada masa Sultan Akbar di bidang politik, ekonomi, agama dan seni.

6.1 Bidang Politik

Penerapan kebijakan politik Jalalludin Muhammad Akbar di India digunakan guna menyeimbangkan sistem pemerintahan dan legitisasi kekuasaan Mughal atas Hindustan. Penerapan kebijakan membawa dampak bagi Kerajaan Mughal dan India. Serangkaian penaklukan wilayah yang dilakukan Jalalludin Muhammad Akbar memberikan pengaruh terhadap Kerajaanya. Kegigihan dan ketangkasan pasukan Mughal dapat dilihat dari wilayah kekuasaan semasa pemerintahan Akbar, hampir sebagian besar wilayah India Utara menjadi daerah aliansinya seperti Amer, Jaipur, Kashmir, Malwa, Bengal dan lain-lain. Strategi pemerintahan Sultan membawa dampak positif bagi masa depan Mughal di India, kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang berhasil mengepakkannya

kekuasaannya ditanah India dan menaungi seluruh wilayah kerajaan Hindu dibawah aliansi Mughal. Mudahnya ekspansi dan penerapan kebijakan Akbar diakibatkan sikap ketoleransian Akbar dalam menjalankan strategi politik dengan penerapan politik *Sulh-e-kul*, diketahui bahwasanya di India merupakan suatu negara yang memiliki keanekaragaman ras, suku, budaya dan agama. Sultan Akbar berhasil memegang kunci penaklukan masyarakat India dengan sistem politik toleransi. Sistem Politik *Sulh-e-kul* juga mempererat hubungan Mughal dengan India, akan tetapi Penerapan sistem politik *Sulh-e-kul* (kebebasan bertindak dan beragama) disalahgunakan oleh kaum Hindu hingga menimbulkan suatu perselisihan antara Raja dan agama raja (Islam) karena kecemburuan sikap toleransi Akbar yang dianggap berlebihan kepada kaum Hindu, hingga memunculkan kelompok radikal Islam yang mulai menjalankan serentetan pembelotan kepada pemerintahan Sultan Akbar yang mengakibatkan adanya pertikaian antara Akbar dan putra sematawayangnya yaitu Pangeran Salim karena keinginannya segera menduduki tahta Kerajaan Munghal. Pembelotan Pangeran Salim mengakibatkan kematian sang guru sekaligus orang setia Akbar yaitu Abu Fadzl. Gejolak politik semakin menjadi-jadi diakhir pemerintahan ditahun 1600 M dengan adanya taktik bangsa Hindu ingin melepaskan diri dari Kerajaan Mughal. Permasalahan yang datang bertubi-tubi di akhir pemerintahan menjadikan tumbangannya kesehatan Akbar hingga penyakit tersebut tidak kunjung sembuh dan membawanya pada akhir hidupnya dan Sultan Akbar dimakamkan di Sikandra (Yatim, 2013:149-150, Sokah, 1994:47-50).

Problematika pada bidang politik Akbar menjadi sebuah dinamika tersendiri di dalam pemerintahan. Politik *Sulh-e-kul* sebenarnya merupakan suatu sistem kebijakan terbaik yang dijalankan di India yang multikultural daripada sistem pemerintahan yang dijalankan pemerintahan Afganistan (Kerajaan Islam) sebelumnya, toleransi yang tidak membedakan antara rakyatnya berdasarkan kelas maupun agama dan memberikan dukungan besar bagi pemerintahannya. Politik ini menciptakan beberapa sistem ketatanegaraan antara lain terbentuknya organisasi kemiliteran dan sistem andministrasi pemerintahan yang terdiri dari (*Diwan* Keuangan dan *Diwan* Kehakiman). Kerjasama dengan Bangsa Hindu

menimbulkan kepercayaannya terhadap kesetiannya kepada Hindustan. Banyak orang hebat yang dapat mengatur pemerintahannya seperti Todar Mall dan Man Singh. Hindustan sendiri merupakan rumah bagi Akbar karena dia lahir dan dibesarkan disana apalagi para pendahulunya pernah menguasai sebagian dataran India dan inilah salah satu faktor yang mendorong Akbar tertarik terhadap negara Hindu ini. Keinginan besarnya membawanya kepada pernikahan politik dengan putri raja Bihari Mall semakin membawa dampak baik karena setelah hal ini membawa kedekatan Mughal dan Rajputana. Dengan adanya aliansi dengan bangsa Hindu memperkuat basis pertahanan Mughal di dalam pemerintahan pusat.

6.2 Bidang Sosial-Ekonomi

Pada masa pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar, keadaan sosial-ekonomi Mughal mulai berubah. Dampak kebijakan ekonomi dapat dilihat pada kehidupan masyarakat dibawah aliansi Mughal baik kerajaan bercorak Hindu maupun Islam (sisa pemerintahan Afganistan), masyarakat dapat merasakan kebijakan sosial-ekonomi Akbar yang rata-rata mengalami keseimbangan. Diketahui bahwa ekonomi Mughal bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan dan sistem pajak. Pajak yang dibebankan menyesuaikan dengan pendapatan masyarakat semakin tinggi jabatan maka pajak yang ditanggungkan semakin besar, pajak terbesar dibebankan pada pejabat Tinggi Mughal seperti Gubernur, Komandan yang mengelola distrik dan para *Diwan* (menteri kerajaan Mughal). Pajak yang dibebankan berupa pajak tanah yang dimiliki setiap pejabat sipil Mughal. Masyarakat perekonomian kecil seperti petani pemilik lahan diberikan pajak rendah dengan pemberian $\frac{1}{3}$ hasil panen dan masyarakat miskin seperti buruh dan petani tanpa lahan tidak diberatkan pajak, selain itu ada denda-denda dari tawanan kalah perang, hadiah dari hubungan kerjasama Internasional dan lain sebagainya. Pajak ini yang nantinya akan menutupi ketimpangan masalah ekonomi pangan Mughal, dengan para petani mendapatkan bantuan dari Kerajaan, dan hasil yang diberikan kepada Mughal akan sedikit lebih tinggi.

Perkembangan kemajuan pada sektor pertanian Kerajaan Mughal merupakan hal pertama kali dibandingkan pada pemerintahan Zaharudin Babur

dan Nashirudin Humayyun , sektor tani seperti biji-bijian, padi, kacang, rempah-rempah, sayur-sayuran, tembakau, kapas, dan nila melonjatkan pendapatan dan menambah devisa Kerajaan. Kemajuan sektor pertanian menyebabkan adanya pengembangan pada sektor industri berupa kain tenun dan kain gordyn yang digagas oleh sang Ratu Mughal yaitu Jodha *Bai*. Kemajuan tersebut juga menyebabkan terjalinnya hubungan India dengan luar negeri melalui jalur perdagangan antara lain Eropa, Afrika, Afrika dan Asia Tenggara. Harga pangan Mughal juga mempunyai jenjang rata-rata atau stabil hingga tahun 1600 M, harga bahan pokok makanan disesuaikan dengan upah yang diberikan kepada tenaga kerjanya, yang mana memunculkan kelas ketenaga kerjaan yaitu kelas tidak terampil dan terampil. Penggunaan kelas ini hanya digunakan untuk pembagian gaji pekerja, kelas tidak terampil memiliki upah 2 *dams* atau setara dengan 1/20 rupee, sedangkan kelas terampil mendapatkan upah 7 *dams* atau setara dengan 7/40 rupee (Yatim, 2013:150, Smith, 1917:390). Sistem yang dijalankan Akbar semasa pemerintahan membawa dampak kestabilan ekonomi di India karena penerapan kebijakan yang adil dan jarang menimbulkan kesenjangan sosial dimasyarakat, adanya permasalahan korupsi yang dilakukan di awal pemerintahan Sultan Akbar langsung ditangani dengan pemberian hukuman berat kepada pelakunya.

6.3 Bidang Agama dan Seni

Selain pada bidang Politik dan Sosial- Ekonomi, kemajuan pemerintahan Mughal ditahun 1556-1605 dibawah pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar dapat dilihat pada bidang Agama dan Seni yang mana menumbuhkan akulturasi dan asimilasi yang menjadikan indetitas atau ciri khas dari Kerajaan Mughal, bahwasanya dapat diketahui Mughal merupakan suatu bangsa yang tidak memiliki *local genius*, budaya yang didapat diperoleh dari daerah ekspansinya dimasa Zaharudin Babur (1482 M - 1530 M) dan Humayyun (1530 M - 1556 M) menggunakan kebudayaan Persia karena berkembangnya Islam Mughal pertama kali di daerah Persia, akan tetapi dimasa Jalalludin Muhammad Akbar

kebudayaan Persia dan India dipadupadankan hingga menumbuhkan budaya Mughal yang terlihat pada bidang agama dan seni Mughal.

6.3.1 Bidang Agama

Pada masa pemerintahan Akbar bisa dikatakan menuai banyak keberhasilan. Ragamnya agama di India antara lain ada agama Hindu, Budha, Kristen, Zoroaster dan Islam, akan tetapi dominan penduduknya memiliki agama Hindu ± 85% penduduk Hindustan. Perbedaan Agama menyebabkan kendala dalam sistem pemerintahan Mughal karena ketidakselarasan menyebabkan perselisihan antar umat beragama, karena hal itu Sultan Akbar menerapkan undang-undang yang dinamakan *Din Illahi*, undang-undang ini satu pokok pikiran dengan politik *Sul-e-kuhl* Akbar yaitu tentang ajaran ketoleransian antar umat beragama agar terjadi suatu keseimbangan disebuah negara. Keberadaan UU *Din Illahi* dianggap menyudutkan agama raja (Islam), ketoleransian yang begitu besar menyebabkan para pemuka agama besar Islam dan masyarakat Islam menganggap bahwa dirinya menyimpang dari ajaran agama Islam, akan tetapi Akbar sendiri merupakan seorang muslim ortodox, Akbar tetap menjalankan ibadahnya dan tradisi dalam Islam. Kebebasan yang diberikan Akbar sedikit memberikan kebencian kepada segelintir masyarakat Islam Mughal karena menganggap adanya diskriminasi terhadap kaum Islam dan lebih memetingkan kepentingan kaum Hindu, sedangkan masyarakat Hindu mengambil kesempatan tersebut dengan menjalankan strategipembelotan dalam rangka mengembalikan wilayah kekuasaan Hindustan ditangan orang Hindustan (Almuhdar, 1983:158-160).

Kesenjangan yang terjadi menumbuhkan agama baru berkembang di India, agama tersebut dikembangan dari isi UU *Din Illahi* yang inti isinya bahwa semua tindakan manusia diatur oleh suatu *Dzat* tertinggiyang disebut Tuhan. Agama yang mulai berkembang tersebut bernama *Sikh* yang didirikan oleh Guru Nanak Dev Ji. Agama ini merupakan gabungan dari Hindu dan Islam, orang-orang *Sikh* kebanyakan adalah orang-orang yang terampil dimedan perang. Agama ini berasumsi bahwa mereka percaya akan adanya satu Tuhan yang Pantaisthik. Kesimpulan dalam bidang agama Akbar banyak mendapatkan beberapa gejala

permasalahan, terlebih lagi posisi agama raja (Islam) tetap menjadi agama minoritas di India pada masa itu, kebebasan beragama inilah yang menjadi salah satu penyebabnya.

6.3.1 Bidang Seni

Jallaludin Muhammad Akbar memang terkenal dengan kegemarannya terhadap seni, sehingga Sultan Akbar diberi gelar sebagai bapak budaya pada masanya. Banyak berbagai macam seni-budaya yang dihasilkan baik berupa karya seni yang tampak maupun abstrak. Antara lain berbagai wujud budaya Akbar yaitu: (1) bahasa, akbar menciptakan sebuah bahasa yang mempermudah dialek dan tidak menjadikan perbedaan penggunaan bagi setiap kalangan yaitu bahasa Urdhu, bahasa ini digunakan hampir disetiap wilayah kekuasaanMughal di India pada masanya. Berkembangnya Bahasa Urdhu karya sastra yang awalnya menggunakan bahasa Persia mulai dialihkan kedalam bahasa Urdhu agar menumbuhkan ciri khas kebahasaan dimasa pemerintahan Mughal. Tak dipungkiri dampak dari penerapan bahasa Urdhu masih dapat kita lihat disebagian wilayah di India dan Pakistan, salah satunya didaerah Provinsi Bagh, Kota Azad Kashmir, Pakistan yang mana bahasa keseharian mereka masih dikembangkan penggunaan bahasa Urdhu dan mereka juga mengakui bahwa disana adalah sisa-sisa keturunan penduduk Islam Mughal; (2) seni lukis, kegemaran Akbar dalam hal menggambar menumbuhkan keinginannya mendirikan sekolah menggambar, banyak hasil karya seni yang dihasilkan baik ukiran atau hiasan dinding seperti goresan seni di Fathepur Sikri, dikertas. Banyak seniman yang berkualitas yang dihasilkan Akbar sebanyak 30 seniman dilindungi hasil karyanya oleh kerajaan, hal ini dikarenakan setiap sebuah lukisan saja bisa menghabiskan waktu kurang lebih selama 7 sampai 14 tahun. Sekarang ini beberapa lukisan masih bisa kita nikmati keindahannya, beberapa berada di museum seni terapan di Wina dan Museum di Inggris; (3) segi bangunannya, seni arsitektur Mughal menumbuhkan keindahan pada setiap bangunan Mughal, pengukir pada dinding-dinding bangunan tersebut merupakan seniman-seniman yang berasal dari sekolah menggambar antara lain Istana Fathepur Sikri, kemegahan istana ini dikarenakan pemindahan

ibu kota di Agra dan dibangunlah istana ini, Akbar juga membangun Masjid besar yang berdekatan dengan Istana yang mana masjid ini hingga sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat India Muslim. Dalam hal seni-budaya dipemerintahan Akbar mengalami perkembangan dan kemajuan, dia juga menghasilkan sebuah karya seni yang menunjukkan identitas dari Mughal di India (Jaffar, 1936:172-177, Almuhdar, 1983:154).

Usaha-usaha yang dilakukan Akbar semata-mata untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, Sultan Akbar tidak hanya memegang satu daerah kekuasaan dengan satu identitas budaya, karena hal itulah banyak pertimbangan Sultan jika menerapkan sistem kebijakannya di kawasan India. Dilihat dari sudut pandang penulis sistem kepemimpinan Akbar dirasakan menuai keberhasilan, pada masa Kerajaan Mughal ditahun 1556 M -1605 M mengalami puncak kejayaan yang dapat menyeimbangkan pemerintahan baik dibidang sosial-ekonomi, politik, dan seni, walaupun dalam bidang agama mengalami sedikit guncangan akan tetapi Akbar masih bisa mengatasinya.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab empat, lima, dan enam maka diperoleh simpulan bahwa pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India pada tahun 1556-1605 M dapat menuai keberhasilan didasari pada setiap kebijakan yang dijalankan antara lain berdasarkan kebijakan Politik yang dilatar belakangi perbedaan sudut pandang dalam penerapan sistem pemerintahan Mughal dan India dan harus diselaraskan agar terlaksananya sistem politik Mughal. Penilaian masyarakat Hindustan terhadap sosok Akbar menimbulkan pengaruh diterima tidaknya Akbar menjadi penguasa Hindustan. Penerapan kebijakan ekonomi Akbar dilatar belakangi guna membantu pertumbuhan kemajuan perekonomian Mughal di India, dan kebijakan agama dan seni dilaksanakan guna menumbuhkembangkan budaya asli Kerajaan Mughal dari sistem akulturasi dan asimilasi budaya.

Jalalludin Muhammad Akbar selama mengemban tugasnya sebagai seorang Raja menerapkan kebijakan di bidang politik, sosial-ekonomi, agama dan seni. Bidang politik Akbar menerapkan politik *Sulh-e-kul* dengan basis pemerintahan militeristik guna mempertahankan kekuasaan Mughal di India. Politik *Sulh-e-kul* merupakan sistem pemerintahan toleransi universal yang mana didalam pemerintahan Akbar semua suku, ras dan agama di India berhak duduk dan menjalankan tumpu pemerintahan Mughal atas Hindustan. Dari penerapan sistem politik Akbar menstabilkan perekonomian Mughal dengan pajak, pertanian maupun perdagangan. Penerapan Undang-undang *Din Illahi* dipemerintahan Akbar guna memperlancar kebijakan agama Akbar, dapat diketahui India dihuni oleh beberapa masyarakat dari beberapa kalangan agama, guna menghalau adanya pertikaian dalam umat beragama maka ditinggikan ketoleransian terhadap umat beragama dengan adanya UU *Din Iilahi*. Raja ke tiga Mughal merupakan sosok yang sangat gemar akan kesenian, untuk menciptakan kesenian khas Mughal Akbar mengakulturasikan budaya India dan Persia dan menjadikan ciri khas dari kesenian Mughal yang dapat dilihat di bangunan Istana Fathpur Sikri dan lukisan-

lukisan yang dihasilkan, Akbar juga menciptakan sebuah bahasa baru yang dinamakan bahasa Urdhu untuk memperlancar komunikasi di wilayahnya. Kebijakan yang diterapkan semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan dan menyelaraskan kehidupan dimasyarakatnya.

Dampak dari kebijakan yang diterapkan Akbar terasa pada setiap bidang, dan saling berkesinambungan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Politik Sulh-e-kul Akbar menjadikan titik perdamaian di dalam pemerintahan. Masyarakat bekerjasama mengatur sistem pemerintahan Mughal dan menstabilisasikan perekonomian dengan sistem pertanian, perdagangan, dan pajak daerah. Berkembangnya UU *Din Illahi* menimbulkan gejolak dikehidupan masyarakat dan memunculkan agama baru yaitu agama *Sikh*, Akbar mentoleransi semua agama yang tumbuh dan berkembang di India asalkan membawa keseimbangan dan tidak mengganggu sistem pemerintahannya. Bahasa Urdhu merupakan bahasa yang wajib digunakan oleh masyarakat dan kesenian Mughal dengan akulturasi budaya, semata-mata untuk menghilangkan perbedaan diantara Mughal maupun *India* dan mempersatukan keduanya menjadi satu kekuasaan dibawah Mughal. Kebijakan yang Akbar terapkan banyak menuai keberhasilan hingga mencapai pada titik kesuksesan, semua keberhasilan yang Jalalludin Muhammad Akbar dapatkan diberbagai bidang tidak terlepas dari dukungan dan peran serta masyarakatnya.

7.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- 1) bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan sejarah serta literatur bagi penelitian sejenis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Mughal di India yang dipimpin oleh Jalalludin Muhammad Akbar;
- 2) bagi almamater, sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi;

- 3) bagi peneliti, dijadikan sebagai media melatih untuk berfikir secara logis dan kritis dalam rangka mengembangkan profesionalisme sebagai guru.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Almuhdar, A, Y. 1983. *Toleransi-toleransi Islam "Toleransi kaum Muslimin dan sikap lawan-lawannya"*. Bandung: N. V. TARATE.
- Al-'Usairy, A. 200. *Sejarah Islam*. Terjemahan oleh Samson Rahman Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Amin, M, S. 2014. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Amstrong, K. 2002. *Islam; Sejarah Singkat*. Terjemahan oleh Funky Kusnaendy Timur. Yogyakarta: Jendela.
- Arnold, T, W. 1967. *The Caliphate*. London: Routledge & Kegan Paul, Ltd.
- Bahri, Saeful. 2015. *Sejarah Peradaban Islam; Sumbangan Peradaban Dinasti-Dinasti Islam*. Pamulang Tangerang Selatan Banten: Pustaka Aufa Media (PAM Press).
- Bharti, S. 2016. The Rajput & Religious Policy Of AkbarThe Great. *International Jurnal In Management and Social Science*. ISSN 2321-1784. Vol.04 Issue-01: 1-5.
- Beveridge, H. 1907. *The Akbar Nama Of Abu-L-Fazl*. Asiatic Society Of Bengal
- Chouhan, K. 2014. The Rajput Policy Of Famous Mughal Emperor Akbar and Aurangzeb. *Govt. P.G. College, India*. ISSN 2347-4564. Vol. 2 Issue-4 : 141-144.
- Duverger, M. 1996. *Sosiologi Politik*. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Erwin, Nuriah, Tuti. 1990. *Asia Selatan Dalam Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Faris, Afdol. 2015. "*Politik Sulh-e-kul Sultan Akbar Pada Masa Dinasti Mughal Di India Tahun 1560-1605*" Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Garbe, V, R. 1909. *Akbar, Emperor Of India*. Gilman Press
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah: Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gurpreet, S. 2016. Religious Policies of Emperor Akbar And Emperor Aurangzeb-an Analysis. *Scholar Punjabi University*, Patiala. ISSN 2277-8179. Vol.5 Issue-3: 36-37.
- Hamka. 1960. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Imri, F. 2014. Dinamika Politik dan Pemerintahan India. *Jurnal Online Wesrphalia*. ISSN 0853-2265. Vol. 13, No. 1.
- Jaffar. S. M. 1936. *The Mughal Empire To Aurangzeb*. Peshawar, Kissa Khani: S. Muhammad Sadiq Khan
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Maliki, Z. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mubarak, J. 2004. *Sejarah Peradaban Islam (Sebuah Ringkasan)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Murodi. 1994. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Musidi, B. 2013. *India (Sejarah Ringkas : Dari Prasejarah Sampai Terbentuknya Bangladesh)*. Jakarta: Diandra Primamitra.
- Pranoto, W, S. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ritzer, G. 2014. *Modern Sociology Theory: Seventh Edition McGraw.Hill*. Terjemahan oleh Triwibowo B.S. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sokah, A.U. 1994. *Din-e-illahi; Kontroversi Keberagaman Akbar (India 1560-1605 M)*. Yogyakarta: Ittaqa Press

Smith, A, V. 1917. *Akbar The Great Mogul 1542-1605*. Oxford University Press.

Sunanto, M. 2003. *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*. Bogor: Prenada Media.

Supriyadi, D. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Thohir, Ajid, dkk. 2006. *Islam di Asia Selatan*. Bandung: Humaniora

Widya, IG. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.

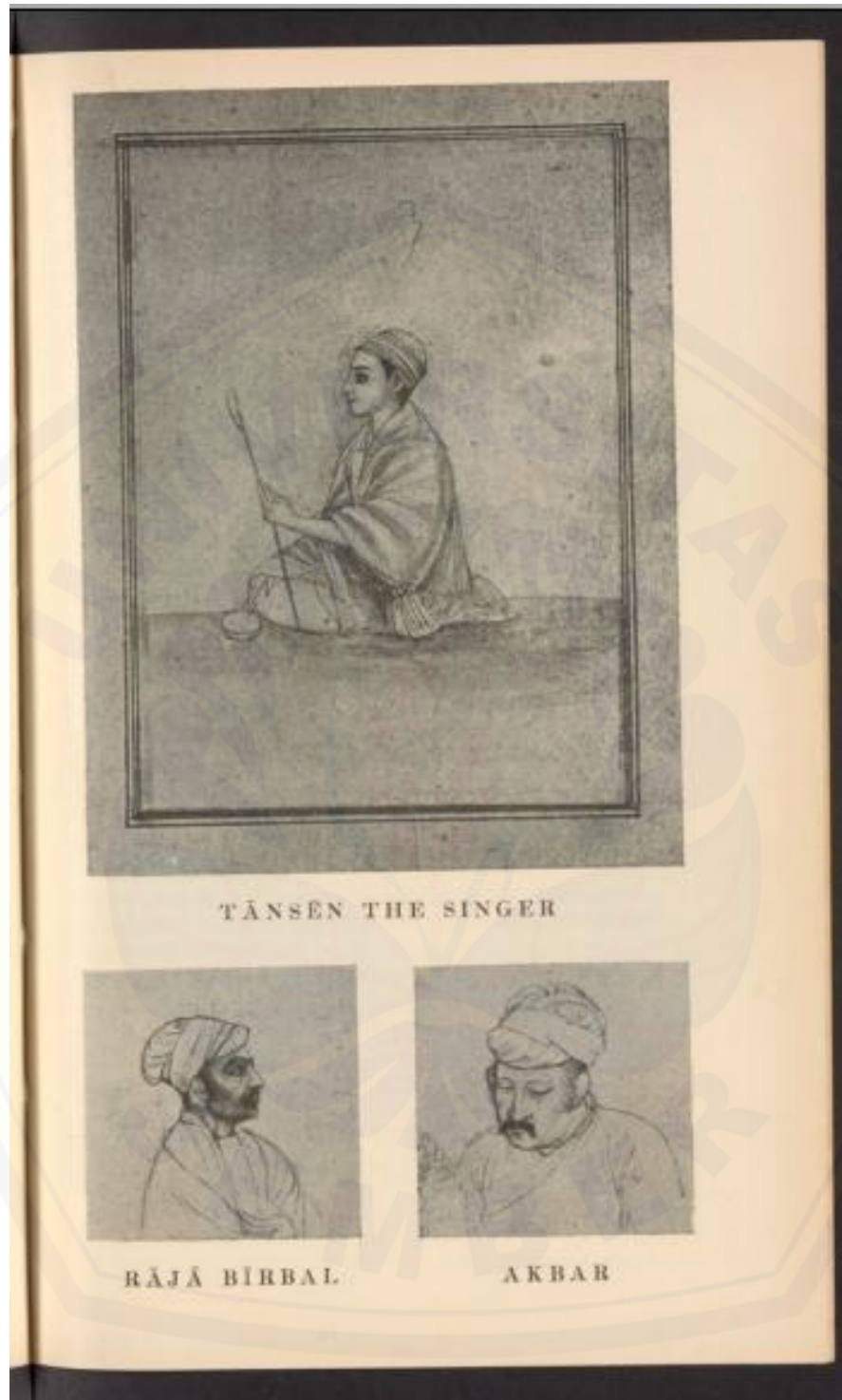
Yatim, B. 2013. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lampiran A.

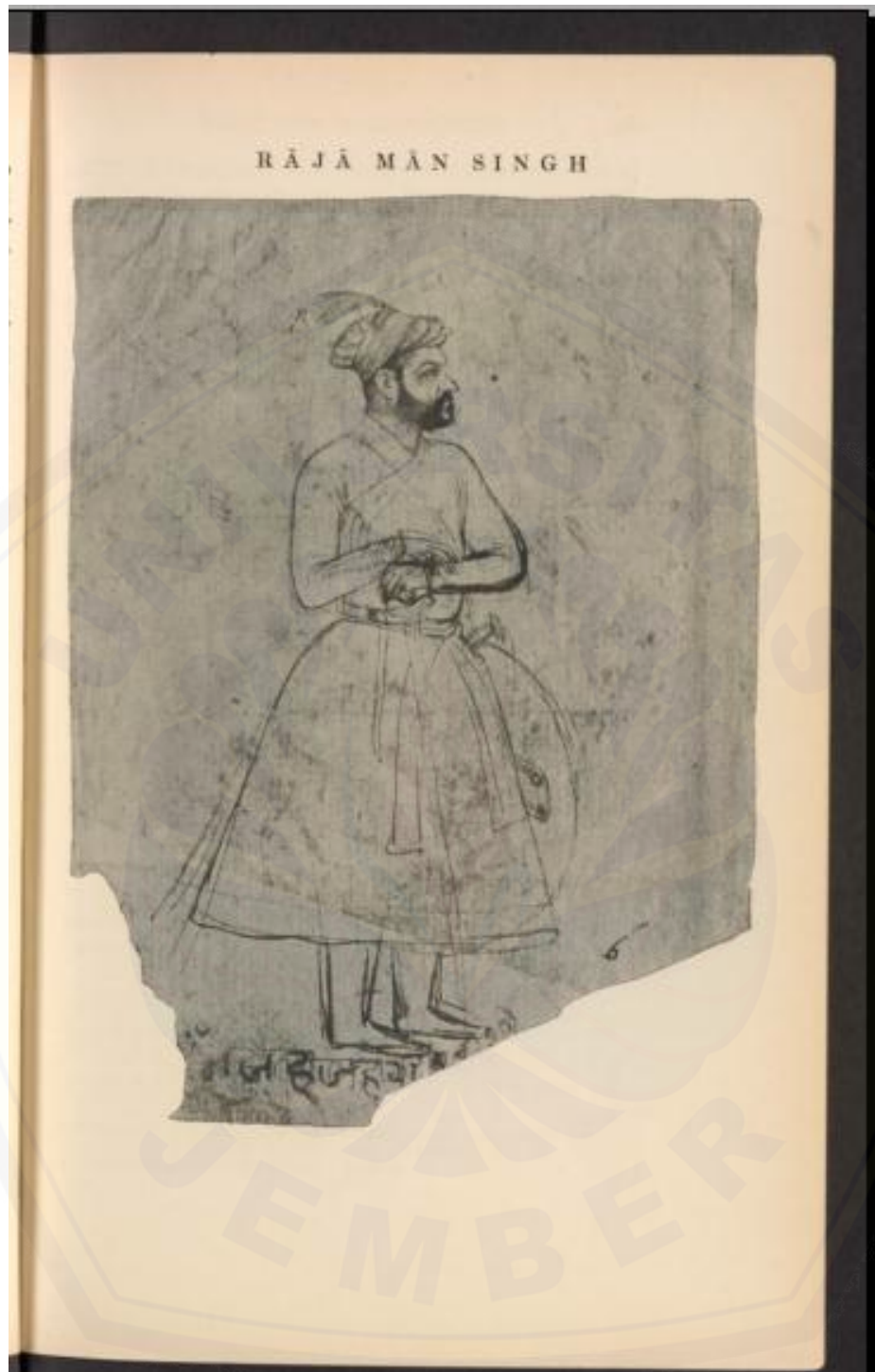
MATRIK PENELITIAN

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	PERMASALAHAN	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Sejarah Peradaban Islam	Kebijakan Pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar Di India Tahun 1556-1605 M	1) Bagaimana latar belakang kebijakan Pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India Tahun 1556-1605 M ? 2) Bagaimana Strategi Kebijakan politik, sosial-ekonomi, agama dan seni pemerintahan Jalalludin Muhammad Akbar di India? 3) Apa dampak kebijakan pemerintahan jalalludin Muhammad Akbar di India tahun 1556-1605 M ?	Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah Sifat Penelitian: Penelitian Studi Pustaka	1. Buku-buku 2. Skripsi 3. Jurnal 4. Artikel 5. Internet Tempat pencarian Sumber: a) Perpustakaan Universitas Jember b) Perpustakaan sejarah Kelamas c) Perpustakaan STAIN Kediri d) Perpustakaan IAIN Jember	Metode penelitian sejarah, dengan langkah-langkah 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi

Lampiran B. Sketsa dan Foto-foto Bangunan Peninggalan Sultan Akbar



Gambar 01: Sketsa lukisan Sultan Akbar, raja Birbal yang merupakan raja Jaipur (mertua Akbar), dan penyanyi di masa Akbar (Sumber: Vincent. A Smith, Akbar The Great Mogul (1917:423)



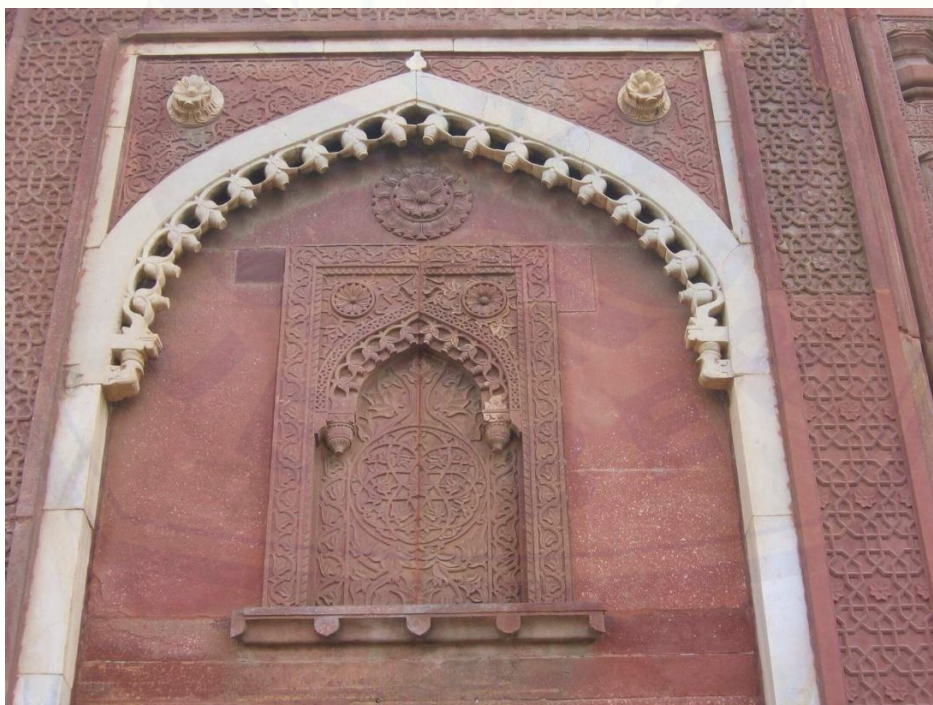
Gambar 02: Raja Man Singh merupakan komandan militer dari bangsa Rajput (kemudian menggantikan kekuasaan Bagwan Das sebagai Raja Jaipur atau Amer) (Sumber: Vincent. A Smith, Akbar The Great Mogul (1917:241))



Gambar 03: Guru dan sastrawan di masa Sultan Akbar, (sumber: Vincent. A Smith, Akbar The Great Mogul (1917:307)



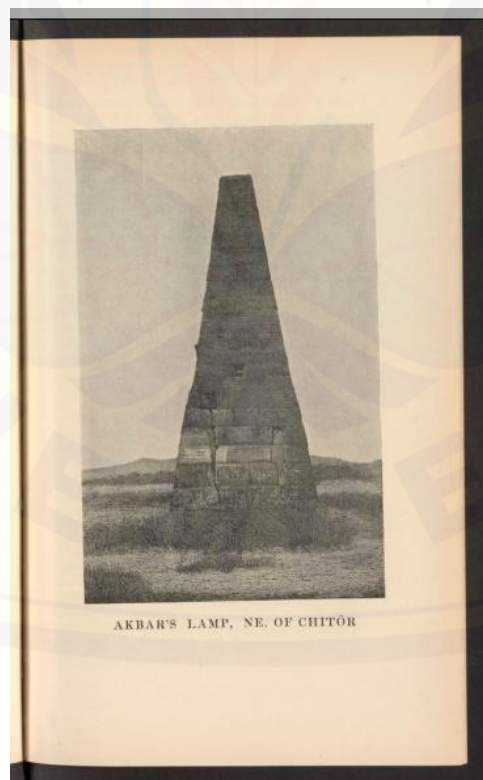
Gambar 04: Sudut Bangunan Istana Fathepur Sikri Peninggalan Mughal di Agra, (Sumber: wawancara respondensi dengan Celia de Fatima Sardinha Crispim, 2017)



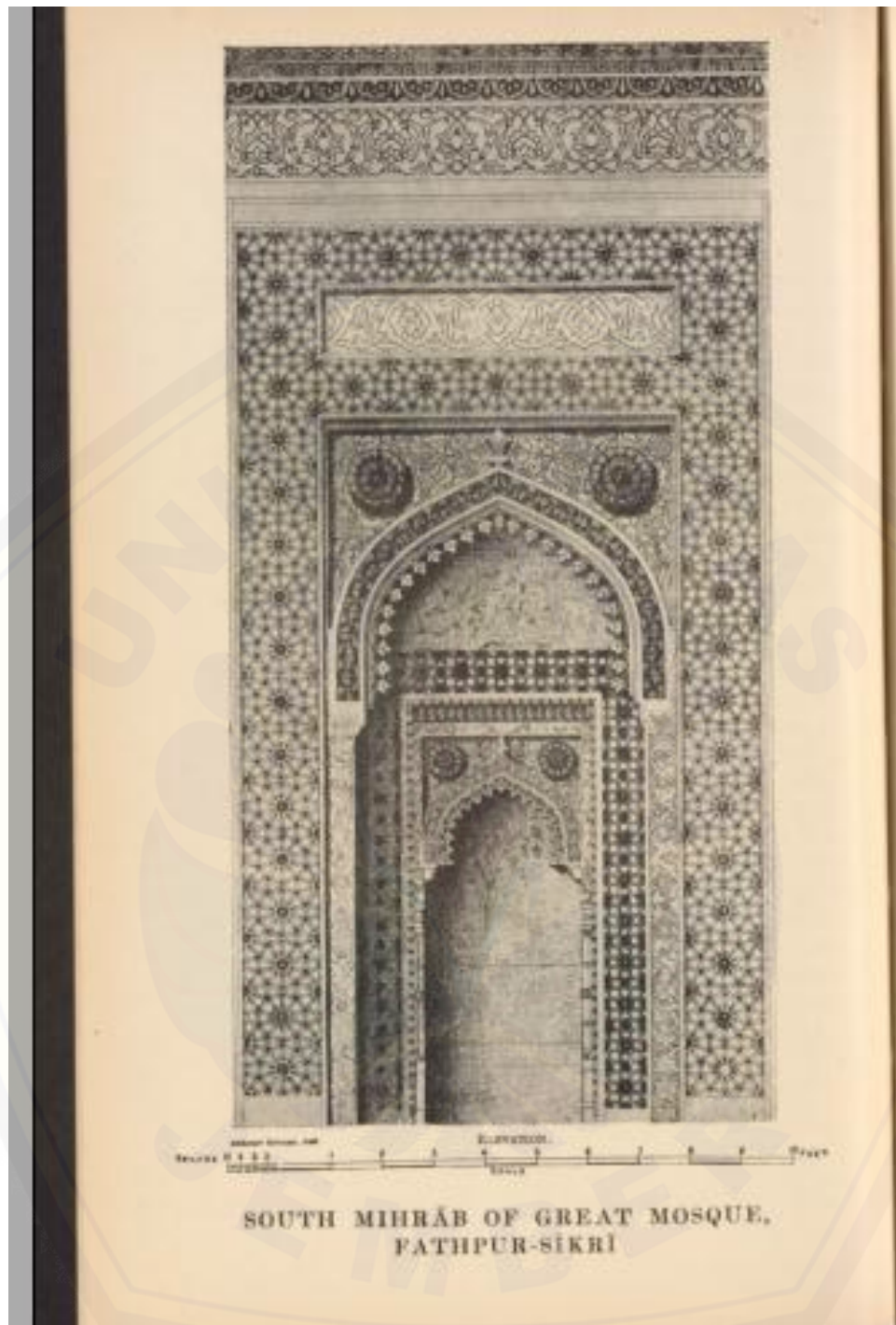
Gambar 05: Arsitektur Jendela di Istana Fathpur Sikri Peninggalan Mughal di Agra, (Sumber: wawancara respondensi dengan Celia de Fatima Sardinha Crispim, 2017)



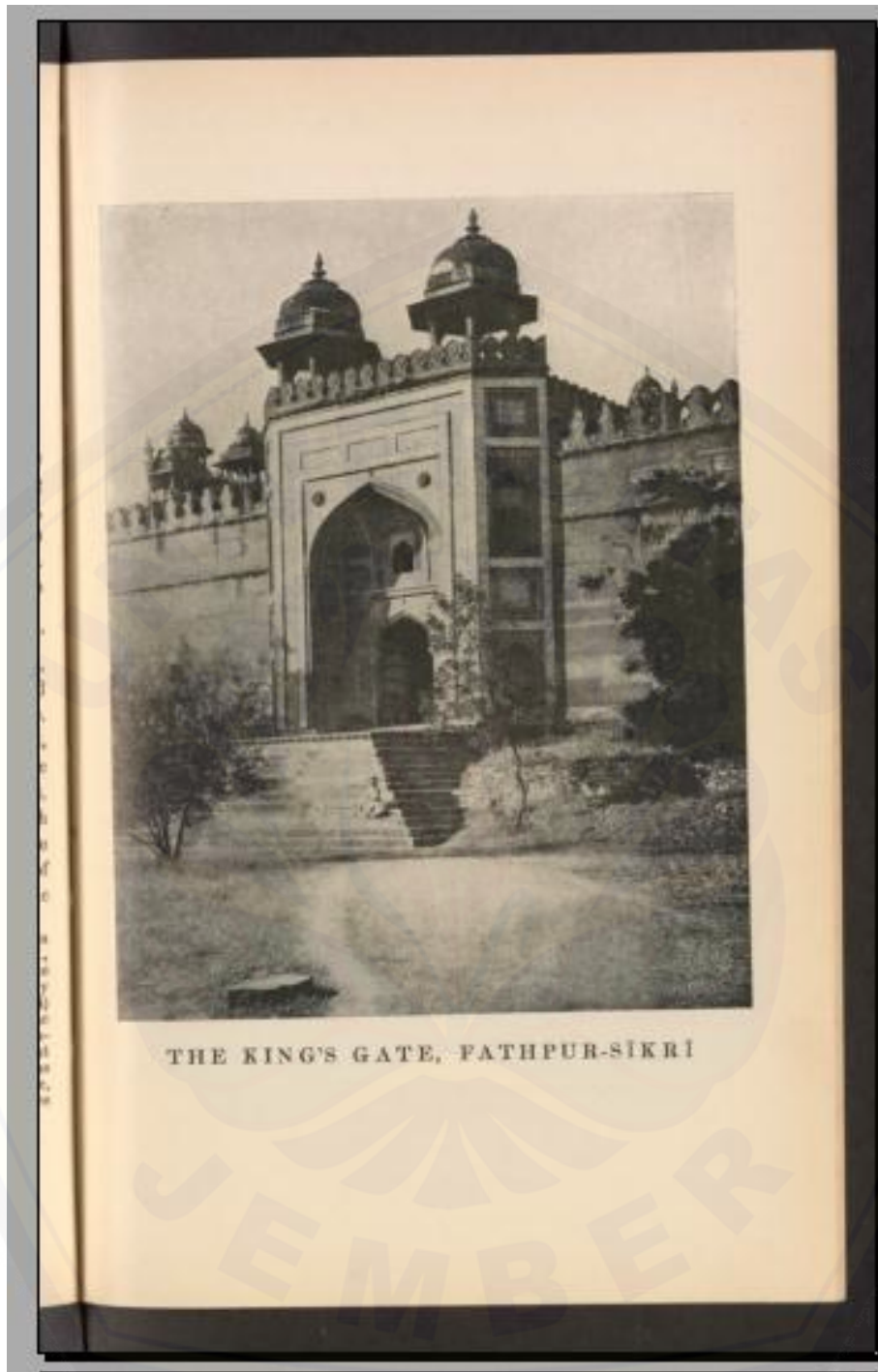
Gambar 06: Kediaman raja Birmal yang didirikan Akbar di dalam wilayah Fathpur Sikri (Sumber: Vincent. A Smith, Akbar The Great Mogul (1917:442))



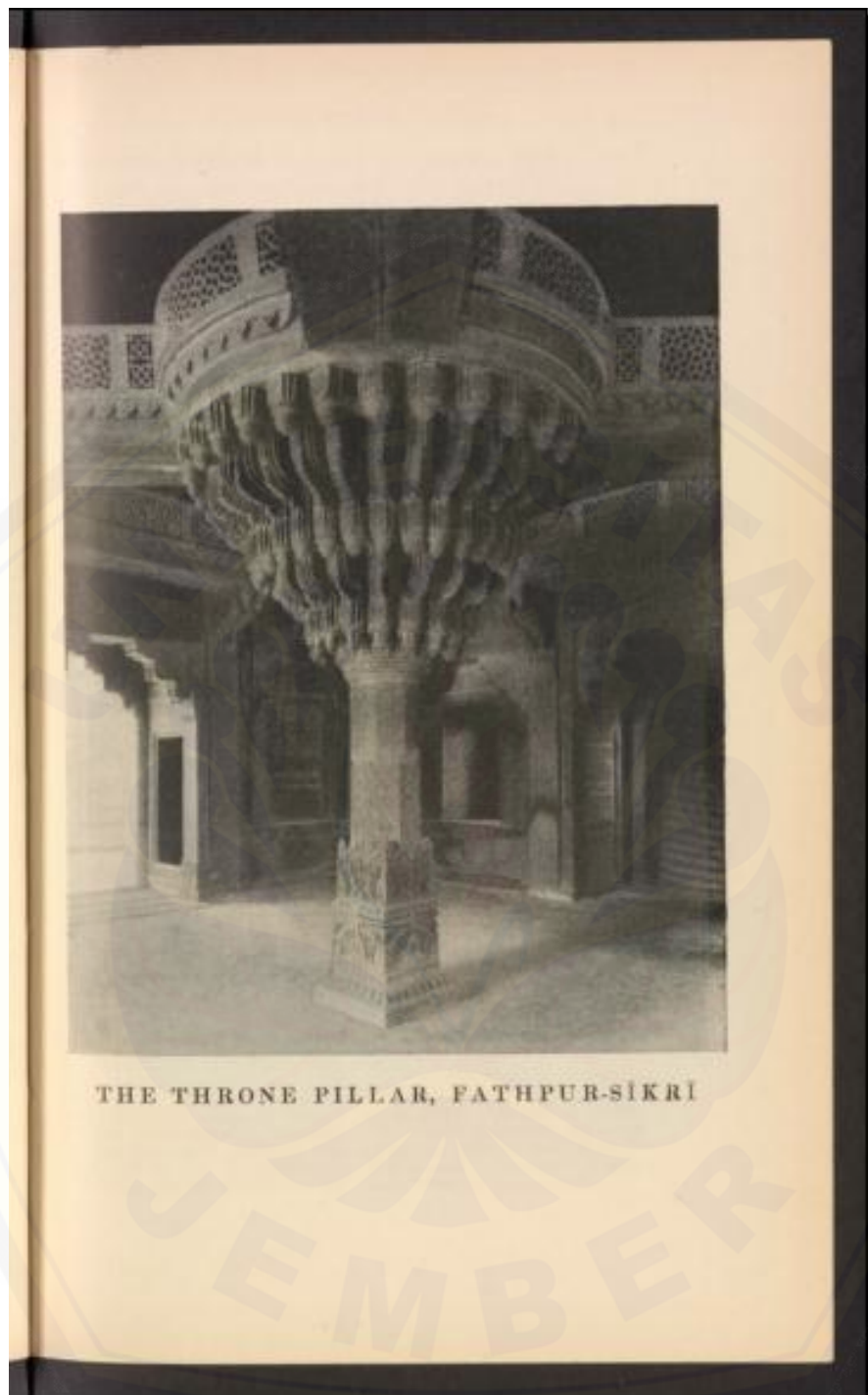
Gambar 07: Bukti kejayaan penguasaan Akbar terhadap Chitor, (Sumber: Vincent. A Smith, Akbar The Great Mogul (1917: 87))



Gambar 08: Mihrab Masjid besar Mughal di Agra , (Sumber: Vincent. A Smith, Akbar The Great Mogul (1917:440))

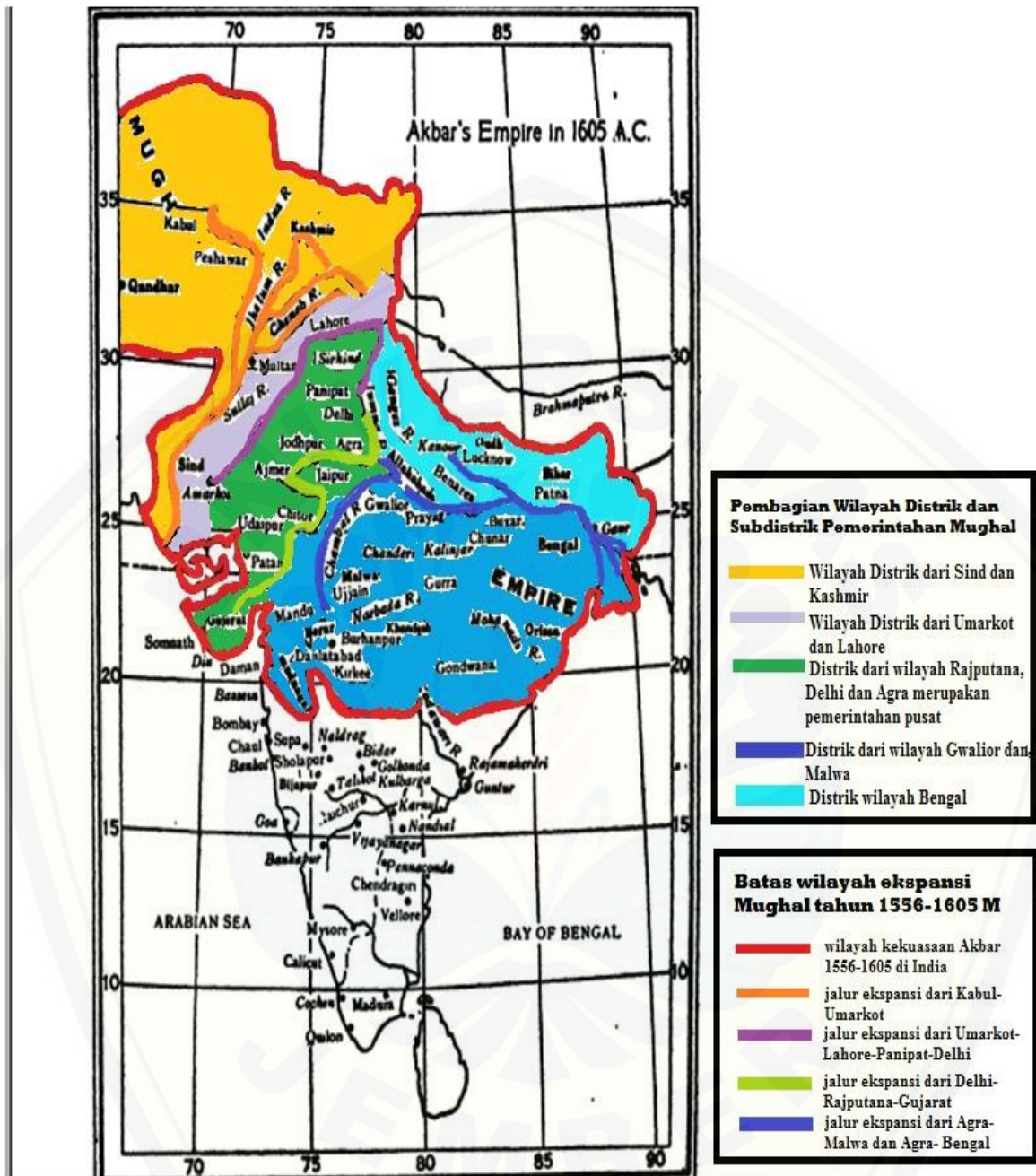


Gambar 09: Pintu kerbang kerajaan Mughal di Fathpur Sikri, (Sumber: Vincent. A Smith, Akbar The Great Mogul (1917:441))



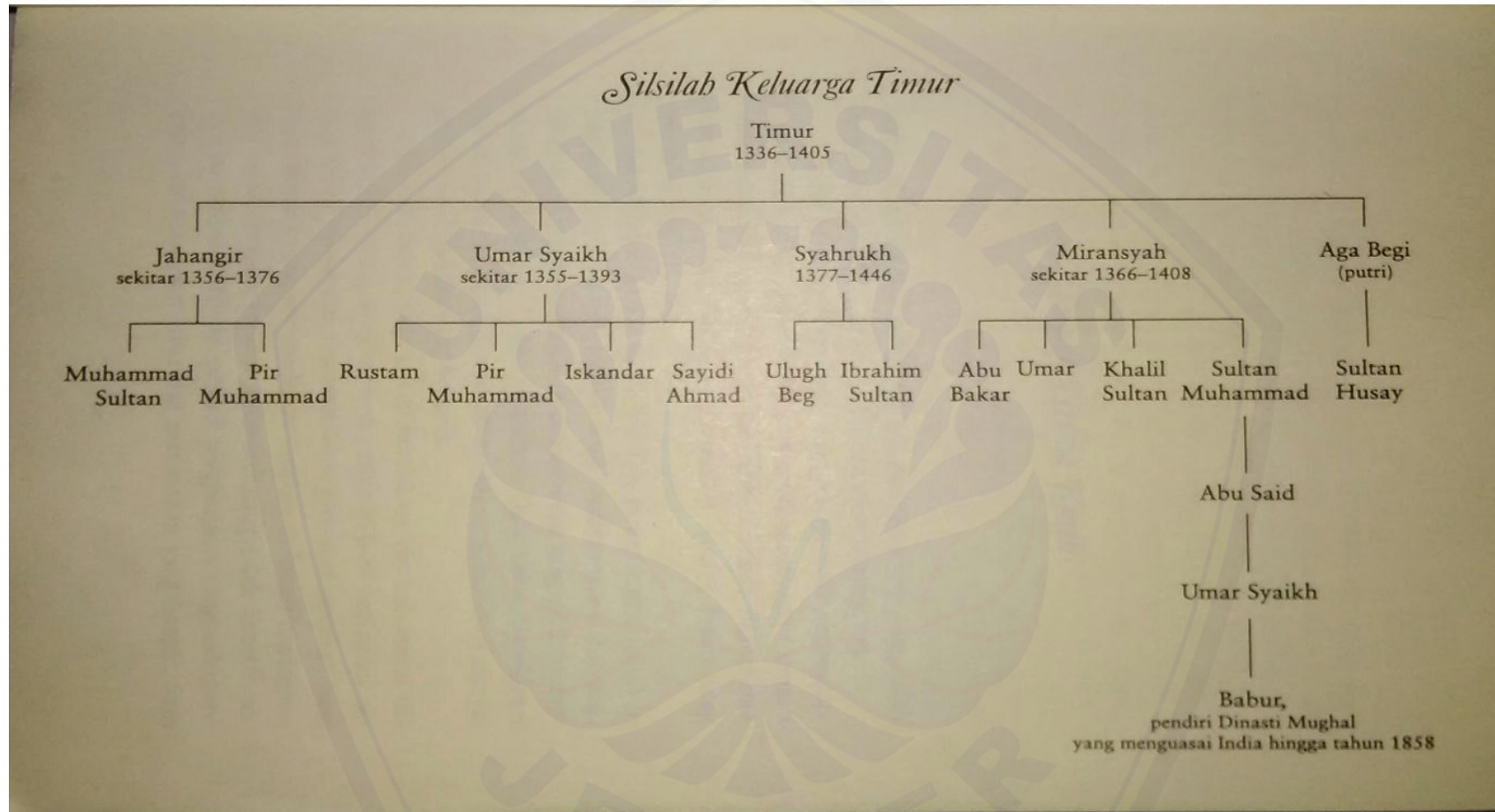
Gambar 10: Arsitektur bangunan Mughal di istana fathpur Sikri, (Sumber: Vincent. A Smith, Akbar The Great Mogul (1917:445))

Lampiran C. Peta Ekspansi Kerajaan Mughal di India Tahun 1556-1605 M



Peta 01: Peta wilayah ekspansi Mughal (1556-1605 M), (Sumber: Jaffar, The Mughal Empire 1936:112)

Lampiran D. Bagan Silsilah Keluarga Timur Lenk



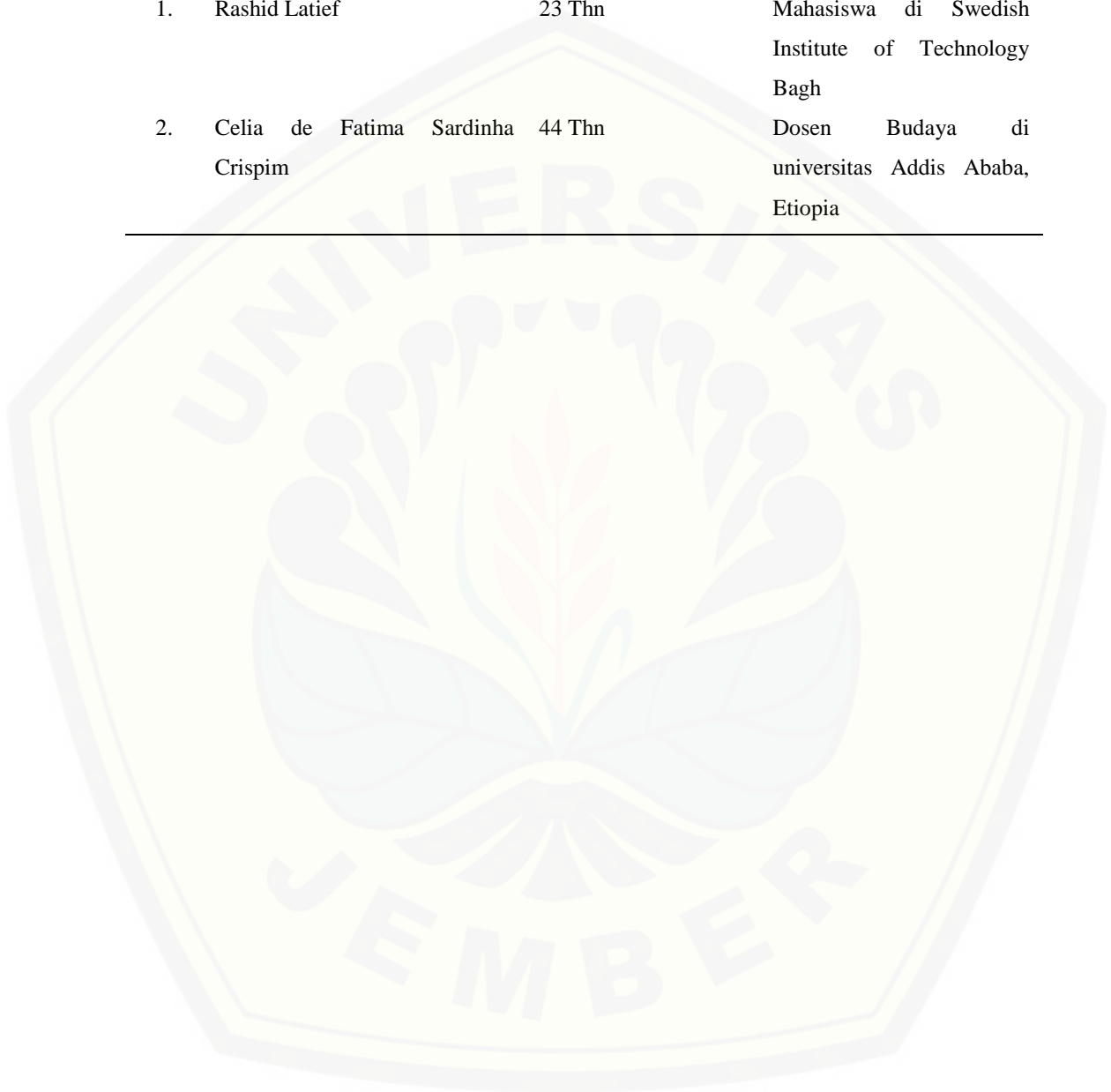
Gambar 01: Silsilah keluarga Jalalludin Muhammad Akbar (dari Timur Lenk hingga Zaharudin Babur (kakek Akbar), (Sumber: Justin Marozzi, Tamerlane 2004)

Lampiran E. Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI**

No	Data Penelitian	Informan	Bentuk Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Peninggalan Kerajaan Mughal dan pengaruh kebudayaanya di masa sekarang ini di wilayah Azad, Bagh, Kashmir, Pakistan	Rashid	Respondensi/ Tertulis	Wawancara
2.	Bangunan peninggalan Mughal di India	Celia	Respondensi/ Tertulis	Wawancara

Lampiran F. Daftar Informan**DAFTAR INFORMAN**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Rashid Latief	23 Thn	Mahasiswa di Swedish Institute of Technology Bagh
2.	Celia de Fatima Sardinha Crispim	44 Thn	Dosen Budaya di universitas Addis Ababa, Etiopia



Lampiran G. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Rashid Latief

Nama : Rashid Latief

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui tentang Kerajaan Mughal ?
2. Apa yang anda pikirkan terhadap sosok Jalalludin Muhammad Akbar ?
3. Apakah anda generasi dari bangsa Mughal ?
4. Bagaimana kebudayaan masyarakat Mughal didaerah Azad Kashmir di masa sekarang ?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai kesamaan atau akulturasi budaya Pakistan dengan India ?
6. Apa saja peninggalan Kerajaan Mughal yang terdapat di Azad Kashmir ?
7. Apa fungsi peninggalan kerajaan Akbar di masa sekarang ?

Jawaban

Mughal adalah suatu Kerajaan Islam yang pernah berjaya di wilayah India. Jalalludin Muhammad Akbar adalah salah satu raja dari kerajaan Mughal yang mengalami kejayaan pada masa pemerintahannya. Di kawasan wilayah distrik Bagh, Azad Kashmir dahulunya merupakan daerah bagian dari kekuasaan Mughal tidak dipungkiri bahwa orang-orang keturunan bangsa Mughal masih ada sampai sekarang. Penduduk Kashmir didominasi beragama Islam seperti agama yang dibawa Mughal dan kebudayaan masyarakatnya merupakan kebudayaan Islam. Kashmir dan India memiliki persamaan bahwasannya dahulu adalah satu kawasan yang sama, akan tetapi Kashmir berbeda dengan India karena memiliki kebudayaan dengan corak Islam sedangkan India bercorak kebudayaan Hindu dan

di Kashmir orang Hindu adalah minoritas. Segi berpakaian dengan menggunakan pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan *salwar kamiz* (baju panjang dengan celana lebar), dan untuk para wanita muslim dilengkapi dengan menggunakan *Dupatta* (selendang penutup kepala). Sistem pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam yaitu orang muslim dengan orang muslim.

Makanan penduduk Kashmir yaitu paratha roti dengan ayam dan segelas *dahi* (susu), nasi dengan daal (masakan yang berasal dari biji-bijian). Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Urdhu, bahasa ini merupakan bahasa nasional dari penduduk Kashmir dan biasanya juga digunakan bahasa Inggris. Wilayah Kashmir terbentang menjadi dua bagian, di bagian barat masuk ke dalam kawasan wilayah Pakistan (budaya Islam) dan selatan masuk wilayah India. Dalam segi pemerintahan masih adanya perselisihan antara kashmir barat dan selatan yang ingin menjadi satu kawasan wilayah India, hal ini dikarenakan kawasan Kashmir merupakan kawasan yang subur dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang mencukupi. Peninggalan Kerajaan Mughal seperti bangunan tidak ditemui didaerah Azad Kashmir, bahwasanya Sultan Jalalludin Muhammad Akbar pemerintahan yang berpusat dikawasan wilayah India jadi peninggalan bangunan Mughal kebanyakan ditemukan di wilayah India Utara.

Sistem perekonomian bertumpu pada sektor pertanian seperti biji-bijian yaitu jelai, millet dan jagung yang biasanya digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, selain itu juga menerapkan sistem peternakan yaitu peternakan biri-biri. Azad Kashmir adalah negara bagian di bawah konstitusi pakistan yang dipimpin oleh seorang presiden terpilih.

Peneliti

Sari Agustina

20 Mei 2017

Responden



Rashid Latief

Hasil Wawancara Dengan Celia de Fatima Sardinha Crispim

Nama : Celia de Fatima Sardinha Crispim
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 44 Tahun
Pekerjaan : Dosen Budaya di Universitas Addis Ababa

Pertanyaan

1. Apa alasan anda berkunjung ke India ?
2. Apa daerah yang anda kunjungi termasuk peninggalan kerajaan Mughal ?
3. Bagaimana bentuk arsitektur bangunan peninggalan Mughal ?
4. Apa fungsi peninggalan kerajaan Akbar di masa sekarang ?

Jawaban

Pada bulan Januari tahun 2008 Celia berkunjung ke India untuk tujuan wisata edukasi guna mengetahui bentuk budaya masyarakat India. Bangunan peninggalan Mughal antara lain ada *Red Fort* (Benteng Merah), Masjid Jami' Mughal dan *Amber Fort* (benteng di Kerajaan Amber. Amber adalah suatu kerajaan Hindu dari Bangsa Rajput yang menjalankan hubungan perkawinan politik dengan Sultan Akbar tahun 1562). Peninggalan Mughal termasuk bangunan yang megah, dari melihat segi bangunan bisa diketahui bagaimana kekuasaan dan kejayaan yang dicapai pada masa kerajaan Mughal. Memasuki kota Delhi tepatnya di Agra bisa dijumpai suatu benteng besar yaitu *Red Fort* yang didalamnya terdapat suatu Istana Mughal yang megah dan terbagi dalam beberapa bangunan-bangunan besar yang difasilitasi dengan kolam-kolam dan taman, pemfasilitasan kolam dan taman digunakan pada Istana Harem yaitu Istana para ratu Mughal. Bangunan benteng ini memiliki ciri khas dari penggunaan batu bata merah dalam pembangunan, akulturasi Islam dan Hindu dilihat dari segi bangunan yang berundak-undak dan terdapat kubah di atasnya selain itu adanya ukiran-ukiran kubah dengan hiasan bunga ditengahnya. Memasuki kawasan Agra disebut dengan kota merah karena bangunan disana mayoritas adalah

bangunan peninggalan Mughal yang terbuat dari batu bata merah, berbeda dengan peninggalan Kerajaan Amer yang mana dalam segi pembangunan menggunakan batu bata berwarna putih. Fungsi bangunan peninggalan Mughal dewasa ini hanya digunakan untuk pariwisata edukasi yang mana selain bisa menikmati indah dan megahnya bangunan juga tahu bagaimana sejarah dari bangunan tersebut.

31 Mei 2017

Peneliti

Responden

Sari Agustina

Celia de Fatima Sardinha Crispim



BIODATA PENELITI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

1. Nama : Sari Agustina
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 26 Agustus 1995
3. Agama : Islam
4. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Satimin
 - b. Ibu : Katiyah
5. Alamat Asal : Jln. Jamsaren 1 RT 02/RW 01, Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri

B. Pendidikan

No	Nama Sekolah	Tempat	Tahun
1	SDN Jagalan V	Kediri	2007
2	SMP Negeri 7 Kediri	Kediri	2010
3	MA Negeri 2 Kediri	Kediri	2013